



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI

2023



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2023

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2024**

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2023

Pengarah:

Siti Fauziah, S.E., M.M.

Penanggung Jawab:

Elis Murniaty, S.Sos.

Tim Penyusun:

Subbagian Monitoring dan Evaluasi

Sutanto, S.AB.

Bernadetta Widyastuti, S.Sos.

Albertina, S.AP.

Dedi Irawan, S.Fil.

Penerbit:

Sekretariat Jenderal MPR RI

Redaksi:

Gedung Nusantara III

Kompleks MPR RI

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6

Jakarta Pusat

Cetakan pertama, Februari 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit



BHINNEKA TUNGGAL IKA

Official event with several men in suits and one woman in a traditional Indonesian batik dress standing behind a long table.

KATA PENGANTAR

*Siti
Fauziah,
S.E., M.M.*

**Plt. Sekretaris Jenderal
MPR RI**



MPR RI sebagai lembaga negara dengan kewenangan tertinggi terus dihadapkan pada berbagai dinamika tantangan domestik maupun global. Untuk itu, Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai unsur pendukung harus terus mampu beradaptasi agar dapat memberikan pelayanan optimal untuk seluruh Pimpinan dan Anggota MPR RI, serta seluruh segmen masyarakat dan pemangku kepentingan.

Transformasi harus dilihat bukan sebagai kegiatan tahunan dan selesai begitu saja, melainkan sikap terus menerus beradaptasi mengikuti tuntutan jaman. Sekretariat Jenderal MPR RI terus berinovasi untuk menjadi institusi yang mampu memberikan pelayanan terbaik.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis. Setiap tahunnya, perencanaan strategis tersebut dituangkan secara konkret ke dalam Rencana Kerja (renja), yang kemudian dituangkan kembali pada dokumen Perencanaan Kinerja. Dengan berakhirnya pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2023, Sekretariat Jenderal MPR RI menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dalam rangka pendokumentasian capaian kinerja, serta pemenuhan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Saya berharap informasi yang tertuang pada dokumen LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang. Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai institusi akan terus melakukan refleksi diri untuk terus meningkatkan akuntabilitas, mencari inovasi dan cara baru, berkolaborasi, berbagi ilmu, untuk saling memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

Jakarta, 28 Februari 2024

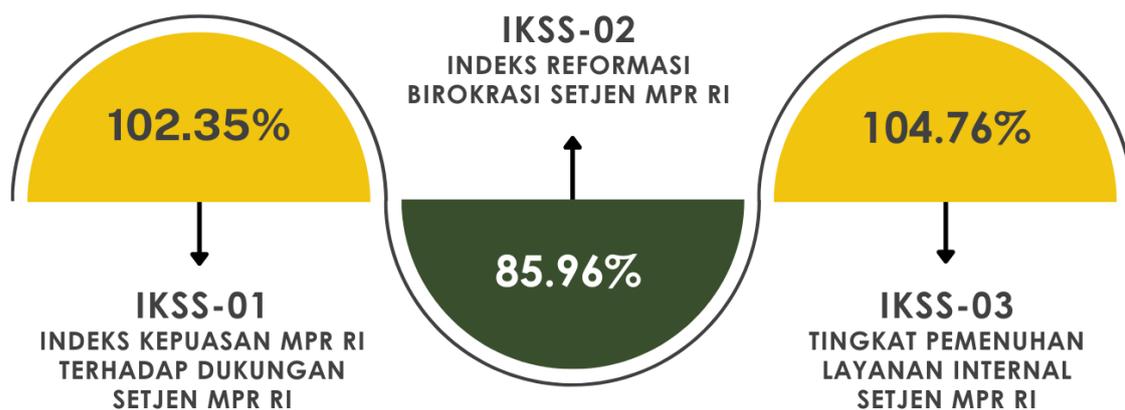


Siti Fauziah, S.E., M.M.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sebagai lembaga publik turut berkewajiban untuk menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Sekretariat Jenderal MPR RI. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholder* demi perbaikan kinerja.

Pelaksanaan kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2023 didasarkan pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2020 – 2023, yang kemudian dituangkan pada dokumen Perjanjian Kinerja yang memuat 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Berdasarkan data pengukuran kinerja, Sekretariat Jenderal MPR RI mampu memenuhi seluruh sasaran serta indikator kinerja yang telah ditentukan, dengan **nilai kinerja** sebesar **98.86 persen**.



Sasaran strategis pertama yaitu "Meningkatnya Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap Layanan Setjen MPR RI" diukur berdasarkan satu indikator yaitu IKSS-01 "Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Setjen MPR RI" dengan realisasi 3.48 dari target 3.40 sehingga capaian sasaran strategis pertama dan IKSS-01 adalah senilai 102.35 persen. Sasaran strategis kedua yaitu "Terwujudnya Birokrasi Setjen MPR RI Berkelas Dunia" diukur berdasarkan dua indikator, yaitu IKSS-02 "Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI" dengan realisasi 69.11 dari target 80.40 (85.96 persen) dan IKSS-03 "Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI" dengan realisasi 99.52 persen dari target 95.00 persen (104.76 persen). Berdasarkan realisasi dua indikator tersebut, capaian sasaran strategis kedua yaitu senilai 95.36 persen. Capaian kinerja tersebut turut didukung dengan realisasi anggaran yang optimal. Adapun **realisasi anggaran** Sekretariat Jenderal MPR RI untuk tahun 2023 adalah

sebesar **94.17 persen**, dengan realisasi sejumlah Rp. 863,930,509,516 dari pagu Rp. 917,377,288,000.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2020 – 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tersisa satu tahun lagi untuk mencapai target jangka menengah yang telah ditentukan. Informasi yang dicantumkan pada Laporan Kinerja diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyesuaikan strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Komponen utama yang kiranya perlu menjadi perhatian adalah terkait Indeks Reformasi Birokrasi yang capaiannya tidak mencapai 100 persen. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan di tingkat nasional, yaitu penajaman *roadmap* dan mekanisme evaluasi Reformasi Birokrasi. Perubahan ini turut memunculkan indikator-indikator baru yang harus dipenuhi. Sekretariat Jenderal MPR RI harus beradaptasi dan melakukan penyesuaian strategi sesuai dengan instrumen penilaian yang baru. Dalam kondisi berikut, seluruh jajaran Sekretariat Jenderal MPR tetap optimis dan percaya diri, secara konsisten melakukan upaya perbaikan melalui tata kelola organisasi, sumber daya manusia, hingga berbagai kebijakan yang kolaboratif dan solutif.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat 10270
Telepon 57895063 Faksimili 57895178 website : setjen.mpr.go.id

INSPEKTORAT

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI**

NOMOR: 7/B-VIII/PI.01/02/2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Sekretaris Jenderal, Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, **tidak terdapat** kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2024

Mengetahui



**Drs. Maifrizar, M.M., Akt.
NIP.196605121995031003**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ix
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR/TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN

1

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
B. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS	4
C. SISTEMATIKA	7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

9

A. RENCANA STRATEGIS	9
B. PERJANJIAN KINERJA	10
C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

15

A. CAPAIAN KINERJA	15
B. REALISASI ANGGARAN	47
C. EVALUASI DAN UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA	48

BAB IV PENUTUP

59

LAMPIRAN	60
----------------	----

DAFTAR GAMBAR/TABEL

Grafik 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal MPR RI.....	3
Grafik 1.2	Komposisi Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal MPR RI.....	3
Grafik 2.1	Framework Rencana Strategis Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2020 – 2024.....	9
Tabel 2.2	Matriks Perencanaan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2020 – 2024.....	10
Grafik 2.3	Alur Penyesuaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023.....	11
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023.....	12
Tabel 2.5	Rincian Pagu Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023.....	12
Tabel 3.1	Nilai Kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023.....	16
Grafik 3.2	Tren Nilai Kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2019 – 2023.....	16
Grafik 3.3	Tren Capaian SS-1 Tahun 2021 – 2023.....	17
Tabel 3.4	Tren Capaian SS-1 Tahun 2021 – 2023.....	17
Grafik 3.5	Tren Capaian IKSS-1 Tahun 2019 – 2023.....	19
Grafik 3.6	Rumus Penilaian SPKL.....	20
Tabel 3.7	Ruang Lingkup SPKL.....	21
Tabel 3.8	Hasil Pengolahan Data SPKL.....	22
Tabel 3.9	Nilai Rata-Rata per Unsur.....	23
Tabel 3.10	Nilai Rata-Rata per Jenis Layanan.....	23
Grafik 3.11	Tren Capaian SS-2 Tahun 2021 – 2023.....	30
Tabel 3.12	Tren Capaian SS-2 Tahun 2021 – 2023.....	31
Grafik 3.13	Tren Capaian IKSS-2 Tahun 2019 – 2023.....	32
Grafik 3.14	Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi Eksternal.....	34
Tabel 3.15	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023.....	35

Grafik 3.16	Tren Capaian IKSS-3 Tahun 2021 – 2023.....	40
Tabel 3.17	Rekapitulasi Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023.....	41
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023.....	47
Grafik 3.19	Tren Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2019 – 2023.....	48
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023.....	49
Grafik 3.21	Tren Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2019 – 2023.....	50
Tabel 3.22	Nilai Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023.....	51
Tabel 3.23	Tindak Lanjut Rencana Aksi LKIP 2022.....	54
Tabel 4.1	Rencana Aksi LKIP 2023.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sebagai lembaga publik turut berkewajiban untuk menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk

perwujudan akuntabilitas. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Sekretariat Jenderal MPR RI. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholder* demi perbaikan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada regulasi yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

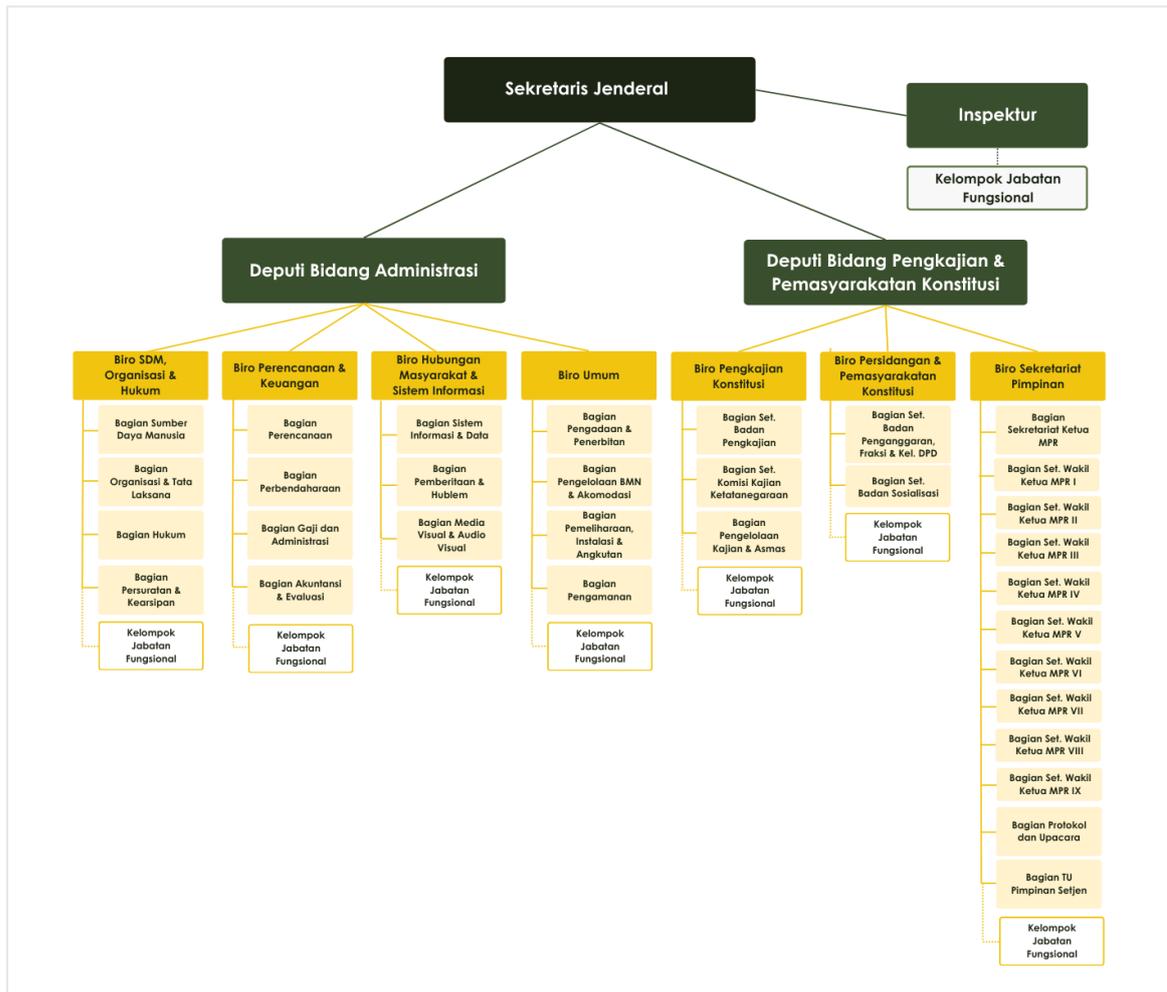
A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal MPR RI menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal MPR RI mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas MPR RI. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal MPR RI memiliki fungsi:

1. perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal;
2. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;
3. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
4. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan bidang administrasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

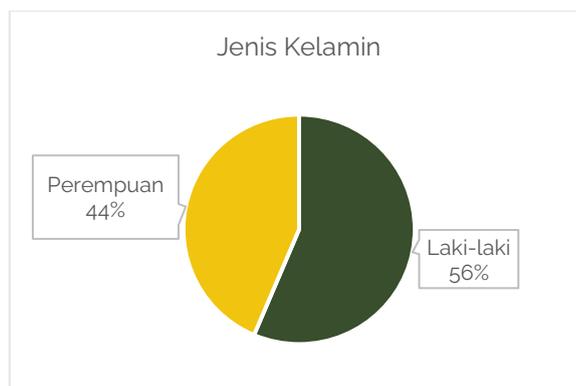
5. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal;
6. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

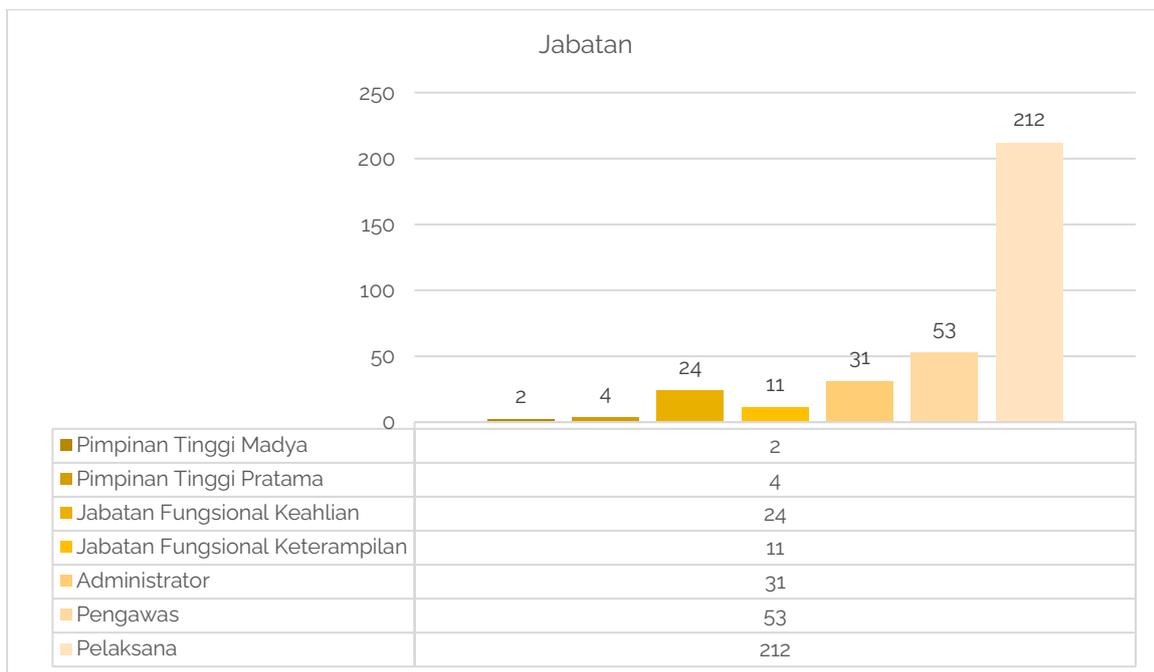
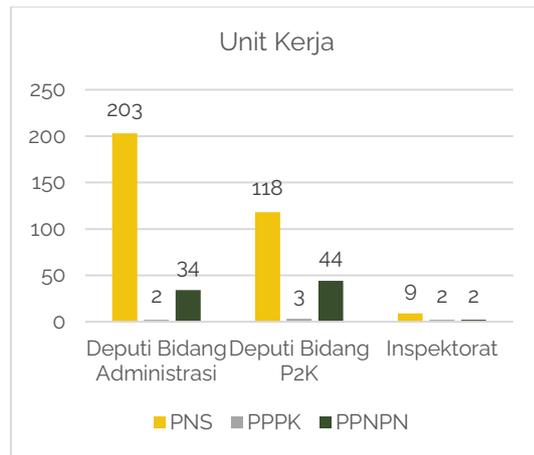
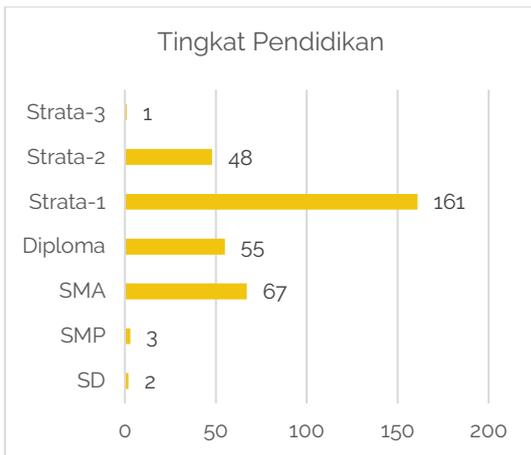
Menindaklanjuti peraturan tersebut, dalam rangka mengatur tugas dan fungsi pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI, ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal MPR RI yang kemudian diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 1 Tahun 2022 dalam rangka upaya penyederhanaan organisasi, sebagaimana tergambar pada grafik berikut.



Struktur organisasi Sekretariat Jenderal MPR RI terdiri atas tiga unit kerja setingkat Eselon I, tujuh unit kerja setingkat Eselon II, dan satu unit

Inspektorat. Secara garis besar, komposisi sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI dapat tergambar sebagai berikut.





B. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Sekretariat Jenderal MPR RI memiliki peran strategis dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas MPR RI sebagai lembaga negara dengan kewenangan tertinggi. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI, Sekretariat Jenderal MPR RI dibentuk

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas MPR RI melalui dukungan pelayanan teknis, administrasi, dan keahlian, dengan susunan organisasi dan tata kerja yang disesuaikan dengan alat kelengkapan MPR RI. Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai sistem

pendukung diberikan mandat yang bersifat strategis, yaitu:

1. mendukung sepenuhnya segala keperluan dan kegiatan MPR RI, Alat Kelengkapan MPR RI, Fraksi dan Kelompok DPD, serta Komisi Kajian Ketatanegaraan dalam melancarkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran MPR RI dan peraturan perundang-undangan;
2. membantu alat kelengkapan MPR RI dalam menyempurnakan redaksi rancangan keputusan MPR RI, yang selanjutnya hasil penyempurnaan tersebut diajukan kembali kepada pimpinan dan anggota alat kelengkapan MPR RI untuk mendapatkan paraf pada setiap naskah yang bersangkutan sebagai tanda persetujuan masing-masing;
3. membantu Pimpinan MPR RI dalam menyempurnakan secara redaksional/teknis yuridis dari rancangan keputusan MPR RI, yang selanjutnya hasil penyempurnaan itu diajukan kembali kepada Pimpinan MPR RI untuk mendapatkan paraf pada setiap halaman naskah rancangan keputusan sebagai tanda persetujuannya;
4. membantu menyiapkan rencana anggaran belanja MPR RI untuk dibahas dan ditetapkan oleh Pimpinan MPR RI; dan
5. membantu Pimpinan MPR RI dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan kebutuhan MPR RI.

Selain itu, Sekretariat Jenderal MPR RI juga memiliki peran strategis lain dalam mendukung pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Sekretariat Jenderal MPR RI berkomitmen untuk mendukung Agenda Pembangunan ke-7, yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan fokus reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas. Komitmen Sekretariat Jenderal MPR RI untuk mendukung agenda pembangunan tersebut juga telah diformalkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2020 – 2024. Adapun pada tahun 2023, isu-isu strategis yang sedang dihadapi Sekretaris Jenderal MPR RI antara lain:

1. Transisi Kepemimpinan

Tahun 2023 Sekretariat Jenderal MPR RI beberapa kali mengalami perubahan kepemimpinan pada posisi Jabatan Tinggi Madya (Eselon I.a) Sekretaris Jenderal MPR RI, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/TPA Tahun 2023, Sdr. Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H. diberhentikan dengan hormat dari jabatan Sekretaris Jenderal MPR RI terhitung mulai tanggal 3 Februari 2023.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2023, Sdr. Dr. Janedri M. Gaffar, M.Si. ditunjuk sebagai Pelaksana

Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI terhitung mulai tanggal 15 Mei 2023.

- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 186/TPA Tahun 2023, Sdr. Dr. Janedri M. Gaffar, M.Si. diberhentikan sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI terhitung mulai tanggal 1 November 2023, serta menunjuk Sdr. Siti Fauziah, S.E., M.M. sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023.

Adanya kekosongan jabatan pucuk Pimpinan pada saat bulan berjalan tentunya menjadi kendala tersendiri bagi pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Namun di sisi lain, transisi kepemimpinan ini juga menjadi momentum penting yang memungkinkan Sekretariat Jenderal MPR RI menata arah kembali (*pivoting*) dan melakukan penguatan kapasitas organisasi. Pengisian jabatan diharapkan tidak hanya mengisi kekosongan, namun juga melanjutkan kesinambungan kinerja program dan kegiatan yang telah berjalan.

2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang Belum Terisi

Hingga akhir tahun 2023, terdapat empat posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang belum terisi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Jabatan yang belum terisi tersebut yaitu Kepala Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi, Kepala Biro Sekretariat

Pimpinan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi, serta Kepala Biro Umum. Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang cukup panjang, memungkinkan timbulnya kondisi tidak adanya pejabat definitif ini terjadi. Hal ini menyebabkan kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang belum terisi dibebankan pada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di luar tugas dan fungsi jabatan definitifnya. Di sisi lain, pejabat non-definitif memiliki keterbatasan wewenang untuk melaksanakan tugas, serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya, dan tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis, yang berdampak pada perubahan status hukum aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Kekosongan ini menyebabkan terhambatnya alur kerja, koordinasi, dan komunikasi antar unit kerja, serta pada internal unit itu sendiri.

3. Penajaman *Roadmap* Reformasi Birokrasi

Penajaman *roadmap* reformasi birokrasi turut memunculkan indikator-indikator baru yang harus dipenuhi oleh Sekretariat Jenderal MPR RI. Hasil koordinasi Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal atau *Strategic Transformation Unit* menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator yang komponennya belum dapat terpenuhi secara optimal. Ketidaksiapan unit dalam memenuhi indikator tersebut berdampak pada

tidak terpenuhinya bobot penilaian yang dapat turut mendukung pemenuhan target kinerja nilai Indeks Reformasi Birokrasi secara total. Selain itu, perubahan mekanisme evaluasi

juga menyebabkan Sekretariat Jenderal MPR RI harus melakukan penyesuaian strategi serta perubahan dokumen perencanaan kinerja sesuai dengan instrumen penilaian yang baru.

C. SISTEMATIKA

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis Sekretariat Jenderal MPR RI dalam mendukung kinerja MPR RI dan pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, serta isu strategis yang dihadapi oleh organisasi pada tahun 2023.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai Rencana Strategis Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2020 – 2024 sebagai dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal MPR RI tahun 2023, serta rencana kerja dan anggaran dalam rangka mendukung target kinerja yang telah ditentukan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan nilai kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran, detail kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis, serta realisasi anggaran terhadap masing-masing sasaran strategis. Selain itu juga diuraikan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja melalui evaluasi internal antara capaian kinerja dan anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, serta tindak lanjut atas Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2022. Di akhir bab ini juga disajikan kinerja lainnya, yaitu penghargaan yang diperoleh Sekretariat Jenderal MPR RI pada level nasional sepanjang tahun 2023.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan uraian terkait langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Sekretariat Jenderal MPR RI untuk terus meningkatkan kinerja.

5. Lampiran

Pada bagian lampiran akan dicantumkan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal MPR RI tahun 2023, realisasi rincian

output dan anggaran, *checklist* reviu oleh Inspektorat, serta sumber pengukuran data masing-masing indikator kinerja strategis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

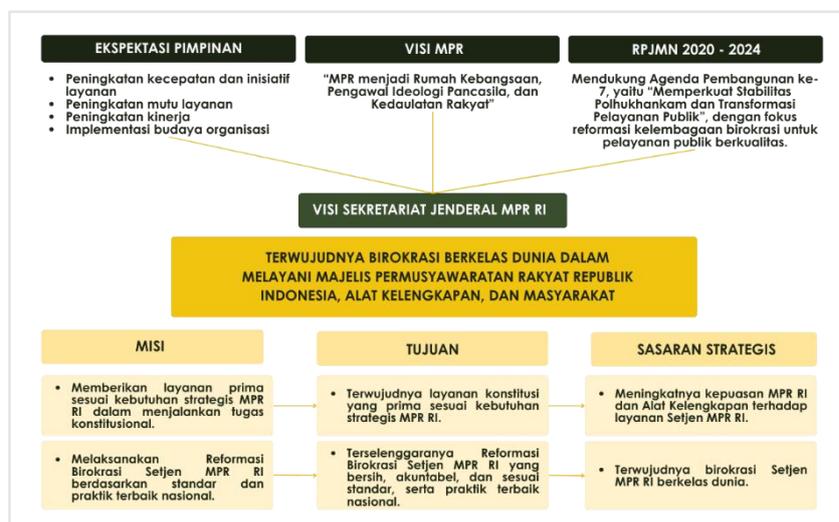
A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2020 – 2024 ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2020 – 2024. Proses perumusan Rencana Strategis

mempertimbangkan tiga unsur, yaitu Visi MPR, ekspektasi Pimpinan MPR dan Sekretariat Jenderal MPR RI, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dijabarkan pada gambar berikut.

GRAFIK 2.1

FRAMEWORK RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2020 – 2024



Penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pada dokumen Rencana Strategis merepresentasikan kondisi yang diharapkan dapat dicapai secara nyata oleh Sekretariat Jenderal MPR RI dan mencerminkan pengaruh (*outcome*) yang hendak diwujudkan pada akhir periode tahun 2024. Sasaran strategis yang merupakan tanggung

jawab Sekretariat Jenderal MPR RI didasarkan pada capaian *outcome* pada *customer perspective* peta strategi Sekretariat Jenderal MPR RI 2020 – 2024. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis diukur menggunakan indikator kinerja sasaran strategis yang dijabarkan pada matriks perencanaan kinerja sebagai berikut.

TABEL 2.2

MATRIKS PERENCANAAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2020 – 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		SATUAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
SS-1	Meningkatnya kepuasan MPR RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Setjen MPR RI	IKSS-1	Indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan Setjen MPR RI	Skala Likert (1 – 4)	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6
SS-2	Terwujudnya birokrasi Setjen MPR RI berkelas dunia	IKSS-2	Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI	Nilai RB (0 – 100)	73.94	76.95	75.00	80.40	82.70
		IKSS-3	Tingkat pemenuhan layanan internal Sekretariat Jenderal MPR RI	Persen (0 – 100)	86.00	87.00	87.00	88.00	90.00

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis, maka target kinerja yang telah ditentukan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal MPR RI Tahun 2023 yang terdiri dari dua sasaran strategis dan tiga indikator kinerja sasaran strategis. Dokumen

iniilah yang dijadikan acuan dalam proses pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal MPR Tahun 2023 mengalami tiga kali penyesuaian, dengan rincian sebagai berikut.



Penyesuaian dokumen Perjanjian Kinerja tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal MPR RI direvisi atau disesuaikan karena adanya perubahan dalam strategi yang

mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran), serta perubahan asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal MPR Tahun 2023 setelah revisi yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal MPR Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

TABEL 2.4

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET
SS-1	Meningkatnya kepuasan MPR RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Setjen MPR RI	IKSS-1	Indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan Setjen MPR RI	3.4 (Indeks)
SS-2	Terwujudnya birokrasi Setjen MPR RI berkelas dunia	IKSS-2	Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI	80.4 (Nilai)
		IKSS-3	Tingkat pemenuhan layanan internal Sekretariat Jenderal MPR RI	95 (Persen)

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pagu alokasi anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 922.077.288.000, namun setelah itu direvisi sebesar Rp. 4.700.000.000 pada komponen belanja pegawai menjadi **Rp. 917.377.288.000**. Penyesuaian ini dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Penyesuaian Belanja

Kementerian/Lembaga yang berasal dari *Blokir Automatic Adjustment* TA 2023 yang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tentang Laporan Semester I dan *Outlook* APBN TA 2023 pada tanggal 3 Juli 2023. Adapun rincian pagu Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023 per program dan per kegiatan disajikan pada tabel berikut.

TABEL 2.5

RINCIAN PAGU SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2023

KODE	URAIAN	PAGU ALOKASI ANGGARAN	PAGU SETELAH REVISI
CF	PROGRAM PENYELENGGARAAN LEMBAGA LEGISLATIF DAN ALAT KELENGKAPAN	652.213.418.000	652.213.418.000
1008	Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR	60.058.948.000	75.390.948.000
5002	Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR	406.917.764.000	391.626.284.000
5003	Pengkajian Kemajelisan	144.588.237.000	144.588.237.000
5728	Penganggaran MPR	25.084.642.000	25.084.642.000
6487	Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI	15.563.827.000	15.523.307.000
WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	269.863.870.000	265.163.870.000

KODE	URAIAN	PAGU ALOKASI ANGGARAN	PAGU SETELAH REVISI
1001	Pengelolaan Administrasi dan Reformasi Birokrasi	12.020.500.000	13.183.823.000
1002	Pengelolaan Administrasi, Publikasi, dan Layanan Informasi	28.010.500.000	28.007.500.000
1003	Pengelolaan Administrasi Perencanaan dan Hak-Hak Keuangan	145.660.468.000	139.127.111.000
1014	Pengelolaan Administrasi Sarana dan Prasarana Kantor	83.146.251.000	83.819.285.000
6485	Pengelolaan Administrasi dan Pengendalian Internal	1.026.151.000	1.026.151.000
TOTAL PAGU		922.077.288.000	917.377.288.000

Proses perencanaan dan penganggaran Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2023 dilaksanakan dengan upaya penyempurnaan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dalam sistem penganggaran melalui Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Tujuan implementasi RSPP yaitu agar proses perencanaan dan penganggaran menjadi lebih tepat sasaran dan fleksibel, serta terjadi peningkatan hubungan antara pengalokasian anggaran dengan kinerja. Adapun kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2023 meliputi:

1. Penyempurnaan rumusan informasi kinerja sesuai pedoman penerapan RSPP dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Prgram Digitalisasi Nasional. Penyempurnaan dilakukan dengan menghidupkan satu KRO (FAB – Sistem Informasi Pemerintahan) dan dua RO (001 –

Pembuatan Aplikasi Penunjang Kinerja dan 002 – Pengembangan Aplikasi Penunjang Kinerja) pada kegiatan Pengelolaan Administrasi, Publikasi, dan Layanan Informasi.

2. Penyempurnaan rumusan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program, serta rumusan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang terkait dengan Indeks Reformasi Birokrasi. Perubahan yang dilakukan berpedoman pada mekanisme evaluasi Reformasi Birokrasi yang baru sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi.
3. Rumusan Target/Capaian Output yang diejawantahkan dalam dokumen rencana aksi dan dipecah menjadi target bulanan. Dokumen ini kemudian dijadikan dasar dalam proses monitoring dan evaluasi, sehingga *progress* capaian kinerja dan realisasi anggaran dapat terpantau secara lebih optimal.



UNDANGAN
SIDANG TAHUNAN MPR RI
BERSAMA DENGAN DPR RI - DPD RI

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023 dapat dilihat dari beberapa perspektif, yaitu **capaian kinerja** terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditentukan, **realisasi anggaran**, serta **kinerja lainnya** yang tercermin dari penerimaan penghargaan yang

memberikan manfaat baik terhadap kondisi internal organisasi, maupun kepada masyarakat secara luas. Di sisi lain, Sekretariat Jenderal MPR RI juga terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan melakukan evaluasi secara rutin dan berkala.

A. CAPAIAN KINERJA

Nilai Kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2023 diukur dengan cara membandingkan antara target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Selanjutnya, secara berjenjang capaian IKSS tersebut dijadikan dasar dalam pengukuran

capaian Sasaran Strategis (SS) dan capaian SS menjadi dasar dalam pengukuran Nilai Kinerja. Adapun hasil pengukuran menunjukkan bahwa **Nilai Kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2023 adalah sebesar 98.86 persen**, sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut.

TABEL 3.1

NILAI KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET IKSS	REALISASI IKSS	CAPAIAN IKSS	CAPAIAN SS
SS-1	Meningkatnya kepuasan MPR RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Setjen MPR RI	IKSS-1	Indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan Setjen MPR RI	3.4	3.48	102.35%	102.35%
SS-2	Terwujudnya birokrasi Setjen MPR RI berkelas dunia	IKSS-2	Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI	80.40	69.11 ¹⁾	85.96%	95.36%
		IKSS-3	Tingkat pemenuhan layanan internal Sekretariat Jenderal MPR RI	95.00	99.52	104.76%	
NILAI KINERJA							98.86%

Keterangan:

¹⁾ Nilai realisasi diambil dari Portal Reformasi Birokrasi Nasional (<https://portalrb.menpan.go.id/>) karena Lembar Hasil Evaluasi resmi belum dikeluarkan.

SS-1 yaitu "Meningkatnya Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap Layanan Setjen MPR RI" diukur berdasarkan satu indikator yaitu IKSS-1 "Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Setjen MPR RI" dengan realisasi 3.48 dari target 3.4 sehingga capaian SS-1 adalah senilai 102.35 persen. SS-2 yaitu "Terwujudnya Birokrasi Setjen MPR RI Berkelas Dunia" diukur berdasarkan dua indikator, yaitu IKSS-2 "Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI" dengan realisasi 69.11 dari target 80.40 dan IKSS-3 "Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI" dengan realisasi 99.52 persen dari target 95.00 persen. Berdasarkan dua indikator tersebut, nilai capaian SS-2 adalah

sebesar 95.36 persen. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dua indikator yaitu IKSS-1 dan IKSS-3 berhasil tercapai, bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Namun, satu indikator yaitu IKSS-2 capaiannya masih berada di bawah target.

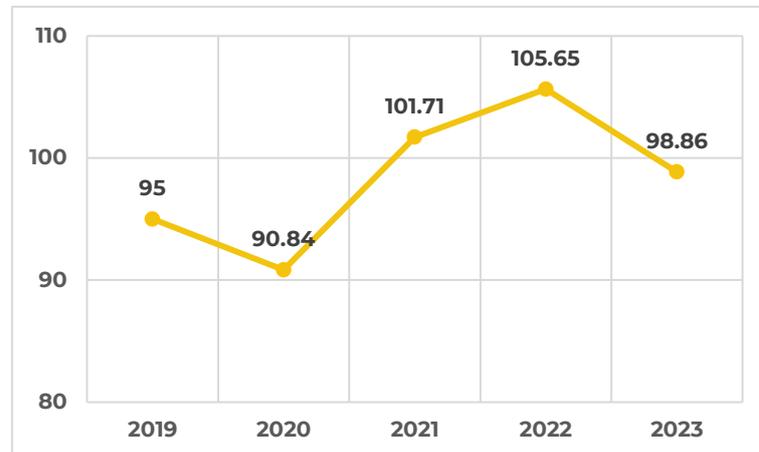
Pengukuran nilai kinerja tidak hanya dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi pada tahun berjalan, namun juga dibandingkan dengan nilai kinerja beberapa tahun sebelumnya. Adapun nilai kinerja Sekretariat Jenderal MPR tahun 2023 mengalami **penurunan** sebesar **6.79 persen** dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya atau nilai kinerja tahun 2022. Hal ini turut dipengaruhi karena adanya indikator dan sasaran

yang capaiannya di bawah 100 persen. Perkembangan nilai kinerja Sekretariat Jenderal MPR dari tahun 2019 sampai

dengan 2022 dapat digambarkan sebagaimana berikut.

GRAFIK 3.2

TREN NILAI KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2019 – 2023



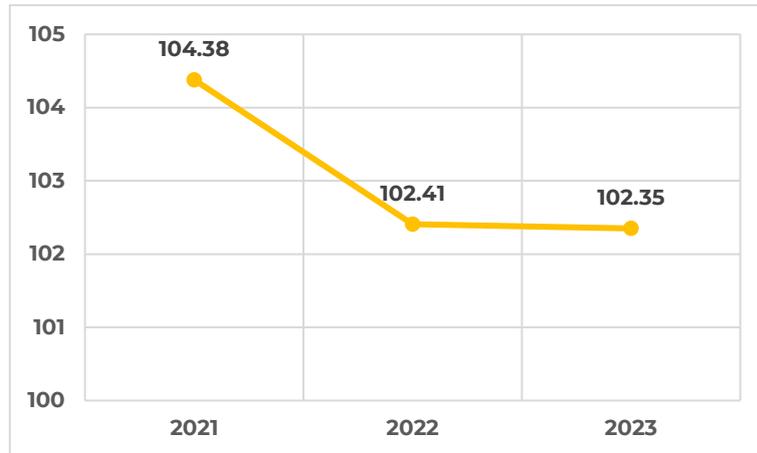
1. SS-1: MENINGKATNYA KEPUASAN MPR RI DAN ALAT KELENGKAPAN TERHADAP LAYANAN SETJEN MPR RI

SS-1 yaitu "Meningkatnya Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap Layanan Setjen MPR RI" merepresentasikan *outcome* dari layanan dukungan pelaksanaan tugas konstitusional MPR, terutama tingkat kepuasan terhadap dukungan pelayanan teknis, administrasi, dan keahlian yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal MPR. Sasaran ini sesuai dengan misi Sekretariat Jenderal MPR yaitu "Memberikan layanan prima sesuai kebutuhan strategis MPR RI dalam menjalankan tugas konstitusional". Adapun tujuan dari misi tersebut adalah Sekretariat Jenderal MPR mampu memberikan layanan prima sesuai standar, kebutuhan, dan harapan MPR. Sesuai standar yaitu

setiap proses pemberian layanan mengacu pada standar yang berlaku sehingga kualitas pemberian layanan dapat terjaga. Sesuai kebutuhan yaitu setiap kebutuhan MPR dalam menjalankan tugas dan wewenang konstitusinya dapat terinventarisir dengan baik, sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan prioritas, kebutuhan, serta harapan penerima layanan. Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Sekretariat Jenderal MPR merumuskan satu indikator yaitu "Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Setjen MPR RI". Adapun perkembangan capaian SS-1 dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat digambarkan sebagaimana berikut.

GRAFIK 3.3

TREN CAPAIAN SS-1 TAHUN 2021 – 2023



TABEL 3.4

TREN CAPAIAN SS-1 TAHUN 2021 – 2023

	2021	2022	2023
Target	3.2	3.3	3.4
Realisasi	3.34	3.38	3.48
Capaian IKSS-1	104.38%	102.42%	102.35%
Capaian SS-1	104.38%	102.42%	102.35%

Meskipun sasaran ini tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2020 – 2024, namun sasaran ini baru tercantum di dokumen Perjanjian Kinerja dan diukur capaiannya pada tahun 2021. Data capaian SS-1 tahun 2021 sampai tahun

2023 menunjukkan tren negatif atau penurunan capaian. Namun dapat dilihat pada tabel 3.4 meskipun capaiannya terus menurun, namun secara realisasi nilai menunjukkan tren yang positif dan terus mengalami kenaikan.

IKSS 1: INDEKS KEPUASAN MPR RI TERHADAP DUKUNGAN SETJEN MPR RI

REALISASI KINERJA INDEKS KEPUASAN MPR RI TERHADAP DUKUNGAN SETJEN MPR RI		3.48
TARGET PK	3.40	tercapai 102.35%
TARGET RENSTRA	3.40	tercapai 102.35%
TARGET JANGKA MENENGAH (2024)	3.60	terpenuhi 96.67%
REALISASI 2021	3.38	meningkat 0.10

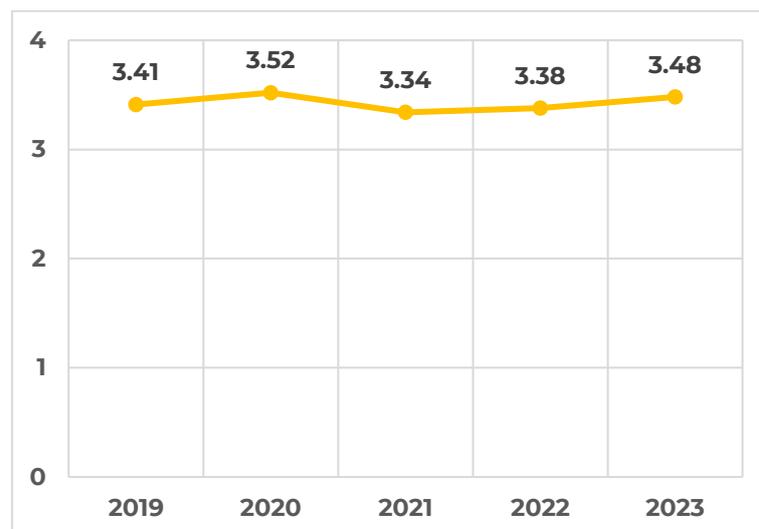
Sejalan dengan upaya reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada MPR RI sebagai Lembaga Negara melalui beberapa terobosan inovatif dan penerapan standar-standar pelayanan yang terukur. Guna mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan Sekretariat Jenderal MPR RI, perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan untuk mendapatkan informasi yang objektif dan komprehensif terhadap layanan yang telah diberikan. Pengukuran tingkat kepuasan dilaksanakan melalui **Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL)**, yang hasilnya akan diolah menjadi nilai Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Setjen MPR RI atau IKSS-1. Hasil survei diharapkan dapat menghasilkan data dan informasi kondisi pelayanan serta harapan para pengguna layanan sebagai dasar

pengambilan kebijakan peningkatan kualitas layanan ke depan.

Berdasarkan hasil SKPL tahun 2023, nilai **Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Setjen MPR RI** adalah **3.48**. Jika disandingkan dengan target pada dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis sebesar 3,40, maka capaiannya adalah sebesar 102.35 persen atau melebihi target yang telah ditentukan. Jika disandingkan dengan target jangka menengah atau target 2024 sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Strategis sebesar 3,60, realisasi tahun 2023 sudah mendekati target atau sudah terpenuhi sebesar 96.67 persen. Nilai ini juga mengalami kenaikan sebesar 0.10 dari nilai tahun sebelumnya atau nilai tahun 2022 yaitu 3.38. Adapun tren nilai Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Setjen MPR RI dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tergambar pada grafik berikut.

GRAFIK 3.5

TREN CAPAIAN IKSS-1 TAHUN 2019 – 2023



Berdasarkan grafik 3.5 dapat disimpulkan bahwa nilai Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Setjen MPR RI mengalami tren yang positif dari tahun 2021 sampai tahun 2023, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 ke tahun 2021. Hal ini turut dipengaruhi karena adanya penyesuaian instrumen survei dimana unsur yang diukur menjadi lebih rigid dan cakupan responden juga diperluas.

SKPL tahun 2023 dilaksanakan secara swakelola oleh Subbagian Monitoring dan Evaluasi bekerjasama dengan perwakilan dari setiap unit kerja di Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi yang memberikan pelayanan langsung kepada Pimpinan dan Anggota MPR RI. Mengingat layanan yang diberikan sangat beragam, untuk memperoleh nilai Indeks secara komprehensif dan seragam antar unit kerja, maka pelaksanaan SKPL didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei dilakukan untuk mengukur delapan dari sembilan unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), yaitu: (1) persyaratan; (2) sistem, mekanisme, dan prosedur; (3) waktu penyelesaian; (4) biaya/tarif - tidak diukur, karena biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan; (5) produk spesifikasi jenis pelayanan; (6) kompetensi pelaksana; (7) perilaku pelaksana; (8) penanganan pengaduan, saran, dan masukan; serta (9) sarana dan prasarana. Nilai SKPL dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama sebagaimana ditetapkan dengan rumus sebagai berikut.

GRAFIK 3.6

RUMUS PENILAIAN SPKL

Bobot nilai rata-rata tertimbang	$= \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{8} = 0,125$	→	Nilai survei = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang (0,125)}$
---	---	---	---

Ruang lingkup pelaksanaan SPKL didasarkan pada dokumen *cascading* kinerja, dimana pengukuran Indeks Kepuasan dilakukan terhadap jenis layanan yang diberikan oleh seluruh

unit kerja yang berada di bawah Deputi Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi, sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut.

TABEL 3.7

RUANG LINGKUP SPKL

KODE	KEGIATAN	JENIS LAYANAN	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	%
1008	Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR	Layanan Kesekretariatan Pimpinan MPR	Pimpinan MPR	10	10	100.00
5002	Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR	Layanan Kesekretariatan Badan Sosialisasi	Pimpinan dan Anggota Badan Sosialisasi	45	25	55.56
5003	Pengkajian Kemajelisian	Layanan Kesekretariatan Badan Pengkajian	Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian	45	12	26.67
		Layanan Kesekretariatan Komisi Kajian Ketatanegaraan	Pimpinan dan Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan	55	39	70.91
5728	Penganggaran MPR	Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran	Pimpinan dan Anggota Badan Penganggaran	15	15	100.00
6487	Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI	Layanan Kesekretariatan Fraksi/ Kelompok DPD	Pimpinan dan Anggota Fraksi/ Kelompok DPD	711	99	13.92
		Layanan Sidang Tahunan MPR	Pimpinan dan Anggota MPR	711	430	60.48

Teknik survei menggunakan dua metode sesuai dengan kebutuhan, yaitu kuesioner luring pada saat pemberian layanan atau pelaksanaan kegiatan, atau kuesioner daring melalui pengisian *google form*. SKPL dilaksanakan rutin setiap satu tahun sekali, dimana pengisian survei tahun 2023 dilaksanakan pada bulan Agustus untuk layanan Sidang Tahunan MPR dan pada bulan Desember untuk enam layanan lainnya. Pengukuran data

survei menggunakan skala Likert dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rincian skala 1 tidak setuju, skala 2 kurang setuju, skala 3 setuju, dan skala 4 sangat setuju. Pengolahan data survei dilakukan secara manual, yaitu seluruh data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir sesuai dengan pedoman yang berlaku, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

TABEL 3.8

HASIL PENGOLAHAN DATA SPKL

NO.	LAYANAN	NILAI RATA-RATA PER UNSUR PELAYANAN								NILAI INDEKS
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	
1	Layanan Kesekretariatan Pimpinan MPR	3.60	3.50	3.50	3.50	3.30	3.60	3.40	3.60	
2	Layanan Kesekretariatan Badan Sosialisasi	3.28	3.24	3.32	3.28	3.36	3.28	3.24	3.28	
3	Layanan Kesekretariatan Badan Pengkajian	3.42	3.42	3.17	3.58	3.17	3.50	3.17	3.33	
4	Layanan Kesekretariatan Komisi Kajian Ketatanegaraan	3.64	3.64	3.72	3.77	3.77	3.82	3.74	3.72	
5	Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran	3.40	3.53	3.53	3.33	3.53	3.53	3.47	3.47	
6	Layanan Kesekretariatan Fraksi/Kelompok DPD	3.64	3.64	3.62	3.61	3.61	3.63	3.54	3.61	
7	Layanan Sidang Tahunan MPR	3.39	3.34	3.39	3.22	3.47	3.47	3.39	3.38	
JUMLAH NILAI PER UNSUR		24.37	24.32	24.26	24.30	24.21	24.84	23.95	24.39	
NILAI RATA-RATA PER UNSUR		3.48	3.47	3.47	3.47	3.46	3.55	3.42	3.48	
NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR		0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.43	0.44	3.48
MUTU PELAYANAN										B
KINERJA UNIT PELAYANAN										BAIK

Keterangan:

NO	UNSUR PELAYANAN
U1	Persyaratan
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
U3	Waktu Penyelesaian
U4	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U5	Kompetensi Pelaksana
U6	Perilaku Pelaksana
U7	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
U8	Sarana, dan Prasarana

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 - 2.5996	D	Tidak baik
2	2.60 - 3.064	C	Kurang baik
3	3.0644 - 3.532	B	Baik
4	3.5324 - 4.00	A	Sangat baik

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan rumus nilai rata-rata tertimbang sesuai dengan jumlah unsur yang diukur, maka diperoleh nilai Indeks Kepuasan MPR RI terhadap

Dukungan Setjen MPR RI adalah 3.48 yang dapat diartikan bahwa nilai **mutu pelayanan** yaitu '**B**' dengan **kinerja unit pelayanan** '**Baik**'.

TABEL 3.9**NILAI RATA-RATA PER UNSUR**

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	MUTU	KINERJA
U1	Persyaratan	3.48	B	Baik
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.47	B	Baik
U3	Waktu Penyelesaian	3.47	B	Baik
U4	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.47	B	Baik
U5	Kompetensi Pelaksana	3.46	B	Baik
U6	Perilaku Pelaksana	3.55	A	Sangat Baik
U7	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3.42	B	Baik
U8	Sarana, dan Prasarana	3.48	B	Baik

Jika dianalisa lebih lanjut, hasil pengolahan data nilai rata-rata per unsur menunjukkan bahwa seluruh unsur yang diukur mendapatkan nilai di atas target 3.40. Mayoritas unsur yaitu tujuh dari delapan unsur mendapatkan mutu 'B' dengan kinerja 'Baik' di rentang nilai 3.42 sampai 3.48 dengan unsur

terendah pada unsur 'Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan' dengan nilai rata-rata 3.42. Di sisi lain, satu unsur mendapatkan nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan unsur lainnya, yaitu unsur 'Perilaku Pelaksana' dengan nilai 3.55 atau mutu 'A' dengan kinerja 'Sangat Baik'.

TABEL 3.10**NILAI RATA-RATA PER JENIS LAYANAN**

NO	LAYANAN	NILAI RATA-RATA	MUTU	KINERJA
1	Layanan Kesekretariatan Pimpinan MPR	3.50	B	Baik
2	Layanan Kesekretariatan Badan Sosialisasi	3.29	B	Baik
3	Layanan Kesekretariatan Badan Pengkajian	3.34	B	Baik
4	Layanan Kesekretariatan Komisi Kajian Ketatanegaraan	3.73	A	Sangat Baik
5	Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran	3.48	B	Baik
6	Layanan Kesekretariatan Fraksi/Kelompok DPD	3.39	B	Baik
7	Layanan Sidang Tahunan MPR	3.61	A	Sangat Baik

Hasil pengolahan data nilai rata-rata per jenis layanan menunjukkan bahwa terdapat tiga layanan yang memiliki nilai rata-rata di bawah target 3.40 yaitu Layanan Kesekretariatan Badan Sosialisasi, Layanan Kesekretariatan Badan Pengkajian, dan Layanan Kesekretariatan Fraksi/Kelompok DPD. Empat layanan lainnya mendapatkan nilai di atas target, yaitu Layanan

Kesekretariatan Pimpinan MPR dan Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran dengan mutu 'B' dan kinerja 'Baik', serta Layanan Kesekretariatan Komisi Kajian Ketatanegaraan dan Layanan Sidang Tahunan MPR dengan mutu 'A' dan kinerja 'Sangat Baik'. Meskipun ada beberapa unsur yang tidak memenuhi target, namun hasil survei masih

menunjukkan kinerja yang cukup tinggi dengan rentang nilai rata-rata per jenis layanan 3.29 sampai 3.73.

Adapun **hal-hal yang telah dilakukan** oleh Sekretariat Jenderal MPR RI dalam memberikan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian, serta **program/kegiatan penunjang** untuk mencapai nilai kepuasan tersebut antara lain:

a. Layanan Kesekretariatan Pimpinan MPR RI

Layanan kesekretariatan yang dilakukan Sekretariat Jenderal MPR RI dalam rangka pelaksanaan tugas Pimpinan MPR RI meliputi layanan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan informasi kegiatan, bahan naskah sambutan atau pidato, dan pengelolaan materi bidang tugas Pimpinan MPR RI. Selain itu, Sekretariat Jenderal MPR RI juga memberikan layanan

keprotokolan, penyusunan acara dan pengacaraan kegiatan, pelaksanaan penyiapan dokumen perjalanan dinas luar negeri, pengaturan tamu dan delegasi, serta pelaksanaan alih bahasa. Sekretariat Jenderal MPR RI turut memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan insidentil seperti Perayaan Hari Konstitusi, Penerimaan Tamu Pimpinan MPR RI, Kunjungan Delegasi pimpinan MPR RI ke daerah dan negara sahabat, Temu Tokoh, dan Musyawarah Pimpinan MPR RI. Sekretariat Jenderal MPR RI juga melakukan berbagai metode untuk mengoptimalkan layanan kepada Pimpinan MPR RI, salah satunya melalui kegiatan Forum Protokol sebagai sarana *sharing session* dan silaturahmi dengan sesama protokol di lingkungan Kementerian/Lembaga.



Pendampingan Pimpinan MPR RI melalui Layanan Keprotokolan

b. Layanan Kesekretariatan Badan Sosialisasi

Sekretariat Jenderal MPR RI memberikan dukungan dalam kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR melalui layanan kesekretariatan pada Badan Sosialisasi. Adapun dukungan yang diberikan meliputi layanan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Sosialisasi, penyusunan materi kegiatan sosialisasi, pengelolaan kerja sama sosialisasi, penyusunan materi rapat, serta dukungan teknis pada berbagai kegiatan

maupun rapat. Kegiatan yang dimaksud meliputi Sosialisasi Empat Pilar oleh Seluruh Anggota MPR di Daerah Pemilihan, Sosialisasi Empat Pilar oleh Pimpinan MPR dan Alat Kelengkapan, Sosialisasi Empat Pilar kepada Instansi/Ormas/Orpol, Sosialisasi Empat Pilar berbasis Komunitas, Diseminasi Empat Pilar kepada Masyarakat Diaspora Indonesia, Pendidikan Penguatan Empat Pilar untuk Generasi Muda, serta Rapat kerja Badan Sosialisasi.



Dukungan Sekretariat Jenderal MPR RI pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada Instansi/Ormas/Orpol

c. Layanan Kesekretariatan Badan Pengkajian

Sekretariat Jenderal MPR RI memberikan layanan kesekretariatan kepada Badan Pengkajian melalui layanan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, layanan penyusunan materi kajian,

pengelolaan kerjasama kajian, penyusunan materi rapat dan *focus group discussion*, dan pengorganisasian kegiatan. Selain itu, Sekretariat Jenderal MPR RI juga memberikan dukungan keahlian melalui penyusunan konsep naskah makalah, sambutan, pidato dan ceramah,

serta penyusunan konsep rekomendasi Badan Pengkajian. Adapun dukungan diberikan pada beberapa kegiatan, meliputi Rapat-Rapat Badan Pengkajian (Rapat Pimpinan, Rapat Pleno, Rapat Kelompok, Rapat Tim Perumus, dan Rapat Koordinasi Badan Pengkajian dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan), *focus group discussion* dengan Perguruan Tinggi atau lembaga riset, Seminar/ Konferensi/

Simposium/ Sarasehan, studi referensi, serta pengorganisasian kegiatan lumpsum yaitu kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat. Sekretariat Jenderal MPR RI juga melakukan berbagai metode kerjasama dalam rangka mendapatkan masukan terkait topik kajian yang sedang dibahas oleh Badan Pengkajian MPR, meliputi penyusunan Jurnal Majelis dan Kajian Akademik.



Pendampingan Sekretariat Jenderal MPR RI pada kegiatan Focus Group Discussion Badan Pengkajian

d. Layanan Kesekretariatan Komisi Kajian Ketatanegaraan

Sekretariat Jenderal MPR RI memberikan dukungan kepada Komisi Kajian Ketatanegaraan melalui layanan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, layanan penyusunan materi kajian, penyusunan materi rapat dan *focus group discussion*, dan pengorganisasian kegiatan. Selain itu, Sekretariat Jenderal MPR RI juga memberikan dukungan keahlian melalui penyusunan konsep naskah makalah,

sambutan, pidato dan ceramah, serta penyusunan konsep rekomendasi Komisi Kajian Ketatanegaraan. Adapun dukungan diberikan pada beberapa kegiatan, meliputi Rapat-Rapat Komisi Kajian Ketatanegaraan yaitu Rapat Pimpinan, Rapat Pleno, Rapat Kelompok, Rapat Tim Perumus, dan Rapat Koordinasi Badan Pengkajian dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan.



Pendampingan Sekretariat Jenderal MPR RI pada kegiatan Rapat Tim Perumus Komisi Kajian Ketatanegaraan

e. Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran

Sekretariat Jenderal MPR RI memberikan dukungan kepada kegiatan Penganggaran MPR melalui penyusunan rencana dan kegiatan, penyusunan materi kegiatan dan rapat, pengelolaan kerjasama dengan mitra Badan Penganggaran, serta pemberian

dukungan teknis dan administrasi pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penganggaran. Adapun kegiatan dimaksud meliputi Rapat Kerja Badan Penganggaran, Sarasehan, Kerjasama antar Majelis dengan Negara Lain (Muhibah), serta Evaluasi dan Penguatan Program Kegiatan MPR.



Pendampingan Sekretariat Jenderal MPR RI pada kegiatan Kerjasama Antar Majelis dengan Negara Lain (Muhibah) ke Wellington, New Zealand

f. Layanan Kesekretariatan Fraksi/Kelompok DPD

Sekretariat Jenderal MPR RI memberikan layanan kepada Pimpinan Fraksi/Kelompok DPD melalui penyiapan bahan perumusan kebijakan dan

pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, persuratan, arsip dan dokumentasi kepada setiap Fraksi dan Kelompok DPD. Adapun dukungan yang

dimaksud diberikan pada kegiatan Rapat Kerja Fraksi/Kelompok DPD, Lokakarya Akademik, Diskusi Publik, Rapat

Konsultasi Fraksi/Kelompok DPD, dan Seminar Fraksi/Kelompok DPD.



Pendampingan Sekretariat Jenderal MPR RI pada kegiatan Lokakarya Akademik Kelompok DPD

g. Layanan Sidang Tahunan MPR RI

Sekretariat Jenderal MPR RI memberikan dukungan pada pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Persiapan yang dilakukan meliputi pelaksanaan rapat-rapat secara internal maupun eksternal, diantaranya Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi/Kelompok DPD, Rapat Koordinasi Sekretariat Jenderal MPR RI dengan Sekretariat Jenderal DPR dan DPD, Rapat Koordinasi Sekretariat Jenderal MPR RI dengan instansi lain (Kementerian Sekretariat Negara, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen

Negara, dan Badan Siber dan Sandi Negara), serta Rapat Koordinasi Internal Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi dengan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR RI.

Selain persiapan melalui rapat dan koordinasi, Sekretariat Jenderal MPR RI juga melakukan persiapan teknis meliputi pencetakan undangan, ID Card (tanda pengenal), stiker kendaraan, label undangan, presensi *QR code*, *banner*, pengadaan souvenir, legislasi undangan dengan Paspampres, penyampaian undangan dan souvenir kepada Pimpinan dan Anggota MPR RI, pelaksanaan gladi kotor dan gladi bersih, dan pengunggahan materi sidang Ketua MPR.

Pada saat pelaksanaan kegiatan, Sekretariat Jenderal MPR RI turut memberikan dukungan pendampingan Pimpinan dan Anggota MPR RI, dukungan materi berupa penayangan bahan

tayang Ketua MPR dan penyediaan pidato Ketua MPR dalam dua Bahasa, dukungan sarana dan prasarana, serta dukungan risalah.



Pelaksanaan Rapat Koordinasi MPR RI dengan Sekretariat Jenderal DPR RI dan DPD RI dalam rangka Persiapan Sidang Tahunan

Dapat disimpulkan bahwa kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI dalam memberikan layanan kepada Pimpinan dan Anggota MPR RI berjalan dengan baik di tahun 2023. Hal ini dikarenakan nilai rata-rata seluruh unsur melebihi target yang telah ditentukan. Namun, Sekretariat Jenderal MPR RI akan terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan dengan memprioritaskan unsur yang mempunyai nilai paling

rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan. Pada tahun 2024, Sekretariat Jenderal MPR RI akan berfokus untuk merumuskan berbagai inovasi perbaikan dan melaksanakan akselerasi pada unsur dengan nilai rata-rata terendah, yaitu unsur Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan dengan nilai 3.42.

2. SS-2: TERWUJUDNYA BIROKRASI SETJEN MPR RI BERKELAS DUNIA

SS-2 yaitu "Terwujudnya Birokrasi Setjen MPR RI Berkelas Dunia" dirumuskan dalam rangka mendukung kata kunci visi pertama dan ketiga yaitu "Birokrasi Berkelas Dunia" dan "Melayani Masyarakat". Sasaran ini sesuai dengan misi Sekretariat Jenderal MPR RI, yaitu "Melaksanakan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI

berdasarkan standar dan praktik terbaik nasional. Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai aparatur pemerintah wajib memberikan layanan publik yang prima kepada masyarakat, yang hanya dapat terwujud jika tata kelola terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal MPR RI berkomitmen untuk melaksanakan

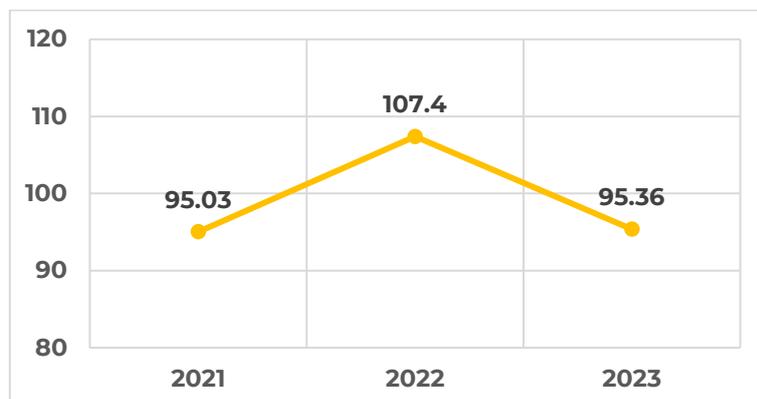
area perubahan Reformasi Birokrasi dengan barometer, standar, dan praktik terbaik di tingkat nasional. Melalui komitmen perubahan menuju birokrasi berkelas dunia, diharapkan Sekretariat Jenderal MPR RI mampu meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik. Kapabilitas organisasi merupakan kemampuan organisasi untuk mengeksekusi strategi yang dipengaruhi oleh keselarasan antara arah strategis dan desain organisasi saat ini. Desain organisasi yang selaras dengan arah strategis diharapkan dapat mendorong tereksekusinya strategi dengan tepat. Akuntabilitas merupakan kemampuan Sekretariat Jenderal MPR RI dalam mempertanggungjawabkan *outcome* atau *output* terhadap sumber daya atau anggaran yang diberikan negara. Akuntabilitas tidak hanya terkait kinerja, namun juga terkait integrasinya dengan anggaran yang harus sesuai dengan fokus pemerintah untuk mendorong penganggaran berbasis kinerja. Peran

vital pengawas internal sebagai ujung tombak pencegahan korupsi perlu semakin diperkuat untuk meminimalisir kerugian materil maupun non-materil. Penguatan dimaksudkan agar terbentuk sistem pengawasan yang independen, professional, dan sinergis untuk menghilangkan potensi dan memberantas budaya korupsi. Pelayanan publik yang prima diharapkan selalu dilaksanakan sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Pentingnya inovasi merupakan salah satu hal kunci untuk meningkatkan kualitas dan mendorong pemanfaatan layanan publik Sekretariat Jenderal MPR RI.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Sekretariat Jenderal MPR RI merumuskan dua indikator yaitu "Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI" dan "Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI". Adapun perkembangan capaian SS-2 dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat digambarkan sebagaimana berikut.

GRAFIK 3.11

TREN CAPAIAN SS-2 TAHUN 2021 – 2023



TABEL 3.12

TREN CAPAIAN SS-2 TAHUN 2021 – 2023

	2021	2022	2023
Target IKSS-2	76.95	75.00	80.40
Realisasi IKSS-2	72.53	75.26	69.11
Capaian IKSS-2	94.26%	100.35%	85.96%
Target IKSS-3	86.00	87.00	95.00
Realisasi IKSS-3	82.39	99.58	99.52
Capaian IKSS-3	95.80%	114.46%	104.76%
Capaian SS-2	95.03%	107.40%	95.36%

Meskipun sasaran ini tercantum dalam dokumen Rencana Strategis, namun sasaran ini baru tercantum di dokumen Perjanjian Kinerja dan diukur capaiannya pada tahun 2021. Grafik 3.11 menunjukkan bahwa capaian SS-2 sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2022 dan kembali menurun pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 telah

dilakukan penyesuaian target untuk IKSS-2 pada dokumen Rencana Strategis sesuai dengan tren nilai Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian tahun 2023 kembali menurun dikarenakan pada IKSS-2 terjadi perubahan mekanisme evaluasi sehingga pada dasarnya tidak dapat disandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

IKSS 2: Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI

REALISASI KINERJA INDEKS REFORMASI BIROKRASI SETJEN MPR RI		69.11 ^{*)}
TARGET PK	80.40	tercapai 85.96%
TARGET RENSTRA	80.40	terpenuhi 85.96%
TARGET JANGKA MENENGAH (2024)	82.70	terpenuhi 83.57%
STANDAR NASIONAL (RATA-RATA INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA 82 K/L)	76.81	terpenuhi 89.98%
REALISASI 2021	75.26	menurun -6.15

Keterangan:

^{*)} Nilai realisasi diambil dari Portal Reformasi Birokrasi Nasional (<https://portalrb.menpan.go.id/>) karena Lembar Hasil Evaluasi resmi belum dikeluarkan.

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat

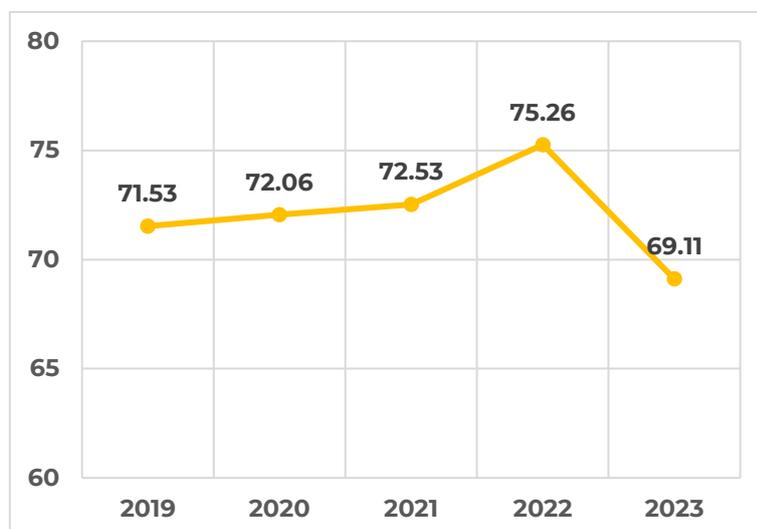
yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat

tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret. Berdasarkan data yang tertuang pada Portal RB Nasional, nilai **Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI**

Tahun 2023 adalah **69.11**, atau kategori '**B**' dengan predikat '**Cukup Baik**'. Jika disandingkan dengan target pada dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis sebesar 80.40, maka capaiannya adalah sebesar 85.96 persen sehingga belum memenuhi target yang telah ditentukan. Jika disandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Strategis sebesar 82.70, realisasi tahun 2023 masih jauh dari target 2024 atau baru terpenuhi sebesar 83.57 persen. Di tingkat nasional, jika disandingkan dengan rata-rata Indeks RB pada 82 Kementerian/Lembaga sebesar 76.81, realisasinya masih di bawah rata-rata nasional yaitu baru tercapai 89.98 persen. Nilai ini juga mengalami penurunan sebesar 6.15 dari nilai tahun sebelumnya atau nilai tahun 2022 sebesar 75.26. Adapun tren nilai Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tergambar pada grafik berikut.

GRAFIK 3.13 TREN CAPAIAN IKSS-2 TAHUN 2019 – 2023



Berdasarkan grafik 3.13 dapat disimpulkan bahwa nilai Indeks RB Sekretariat Jenderal MPR RI mengalami tren yang positif dari tahun 2019 sampai tahun 2022, namun menurun cukup tajam pada tahun 2023. Hal ini turut dipengaruhi karena pada tahun 2023 terjadi perubahan kebijakan nasional terkait RB, sehingga pada dasarnya nilai 2023 tidak bisa disandingkan dengan penilaian tahun-tahun sebelumnya. Perubahan kebijakan RB didasarkan pada hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa dampak RB dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan RB. Hal ini menyebabkan pada tahun 2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan penajaman dan penyederhaan evaluasi RB untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Penajaman dan penyederhanaan evaluasi RB dilaksanakan dengan tujuan: 1) lebih mengukur hasil dan dampak dibandingkan dengan proses; 2) menghilangkan kesan penilaian yang bersifat administratif; dan 3) harmonisasi, integrasi, dan sinergitas indikator penilaian reformasi birokrasi. Adapun instrumen terbaru pelaksanaan dan evaluasi RB dituangkan pada beberapa peraturan, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024.
- 2) Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
- 3) Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

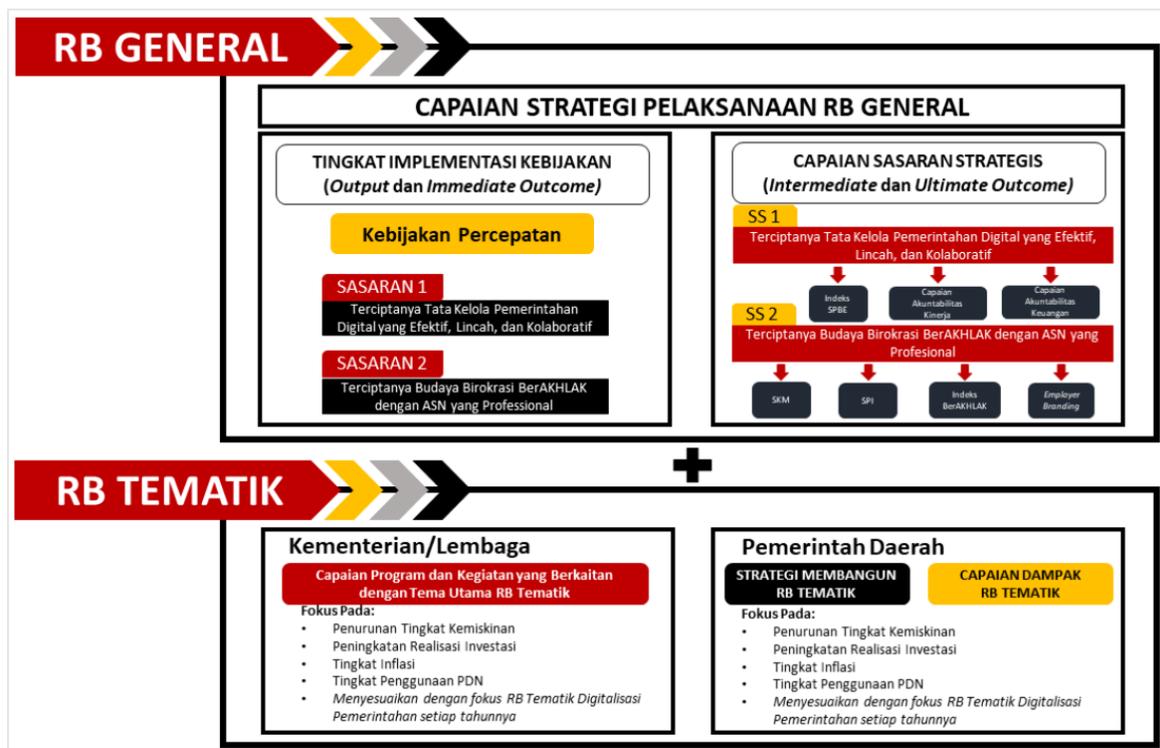
Berdasarkan instrumen kebijakan terbaru, terdapat dua jenis evaluasi RB, yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Ruang lingkup evaluasi internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (*ex-ante*) dan evaluasi tahap pelaksanaan (*on-going*). Adapun evaluasi eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan RB (*ex-post*).

Penilaian IKSS-2 diukur dengan nilai evaluasi eksternal yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB. Terdapat dua dimensi dalam evaluasi eksternal RB, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan RB berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema

prioritas pembangunan. Selain itu, Evaluasi RB Tematik juga mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait. Secara lebih rinci, di bawah ini

adalah gambar yang menunjukkan komponen-komponen pada setiap dimensi.

GRAFIK 3.14 KOMPONEN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI EKSTERNAL



Hasil evaluasi RB dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen pada dimensi RB Tematik maupun RB General. Untuk menetapkan tingkat pelaksanaan RB di Sekretariat Jenderal MPR RI. Adapun sampai Laporan Kinerja ini selesai

disusun, Laporan Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PANRB belum keluar, sehingga realisasi nilai yang digunakan diambil dari Portal Reformasi Birokrasi Nasional (<https://portalrb.menpan.go.id/>) sebagaimana tercantum pada data berikut.

GRAFIK 3.15

HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
TAHUN 2023

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR	SKOR INDEX
	INDEKS RB			69.11
I	Strategi Pelaksanaan RB General	10		8.53
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2.85	2.85
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	85.39	5.68
II	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40		19.38
II.1	Hard Elemen	33		15.14
1	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	1.37	0.03
2	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	0.8	0.32
3	Tingkat Maturitas SPIP	4	3.079	2.46
4	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3	0.5	0.5
5	Nilai SAKIP	4	66.78	2.67
6	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	100	2.00
7	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	1	0.4
8	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	83.2	1.66
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	93.56	1.87
10	Indeks Pengelolaan Aset	2	3.04	1.52
11	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1.5	1	0.3
12	Indeks Kualitas Kebijakan	1.5	25.79	0.39
13	Indeks Reformasi Hukum	1.5	-	-
14	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.5	1.15	0.34
15	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	34.07	0.68
II.2	Soft Elemen	7		4.24
1	Indeks Sistem Merit	4	306.5	2.99
2	Indeks Pelayanan Publik (Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombusman RI)			
	a. Indeks Pelayanan Publik	1.5	4.15	1.25
	b. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.5	-	-
III	Capaian Sasaran Strategis	50		36.66
III.1	Hard Elemen	28		20.87
1	Indeks SPBE	9	2.93	5.27
2	Capaian Akuntabilitas Kinerja	10		
	a. Capaian Prioritas Nasional	2	100	2
	b. Capaian IKU	8	100	5.34
3	Tingkat Akuntabilitas Keuangan			
	a. Opini BPK	5	5	5

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR	SKOR INDEX
	b. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	4	81.4	3.26
III.2	Soft Elemen	22		15.79
1	Indeks BerAkhlak	4	48.8	1.95
2	Survei Penilaian Integritas	10	72.22	7.22
3	Survei Kepuasan Masyarakat	8	82.8	6.62
	NILAI RB GENERAL	100		64.57
	TOTAL RB GENERAL PENYESUAIAN	97		66.57
1	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan			
	a. Strategi Pembangunan	0.8	0.8	0.8
	b. Capaian Dampak	1.2	0.1	0.1
2	Penggunaan Produk Dalam Negeri			
	a. Strategi Pembangunan	0.8	0.8	0.8
	b. Capaian Dampak	1.2	69.73	0.84
	TOTAL RB TEMATIK	4		2.54

Pencapaian pada setiap komponen penilaian tidak lepas dari upaya Sekretariat Jenderal MPR RI untuk bersungguh-sungguh mengimplementasikan reformasi di berbagai aspek birokrasi, layanan publik, dan inovasi yang dibuat dalam rangka perbaikan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Selain itu, hasil evaluasi tersebut juga merefleksikan adanya proses pengelolaan reformasi di Sekretariat Jenderal MPR RI melalui tata kelola yang baik. Pada tahun 2023, **hal-hal yang telah dilakukan** oleh Sekretariat Jenderal MPR RI atau **program/kegiatan penunjang** untuk mencapai target nilai Indeks RB, meliputi:

1. Penyampaian Informasi Praktik baik RB

Berdasarkan Surat Kementerian PANRB Nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 mengenai Perubahan

Evaluasi RB Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik RB, disampaikan bahwa mekanisme evaluasi pelaksanaan RB tahun 2023 akan dilakukan berdasarkan peraturan terbaru. Namun, untuk mendapatkan gambaran perkembangan pelaksanaan RB yang telah dilakukan dan sebagai media pembelajaran RB antar instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah, termasuk Sekretariat Jenderal MPR RI, diminta untuk menyampaikan informasi praktik baik pelaksanaan RB, berupa inovasi yang berdampak kepada masyarakat dan *stakeholders*.

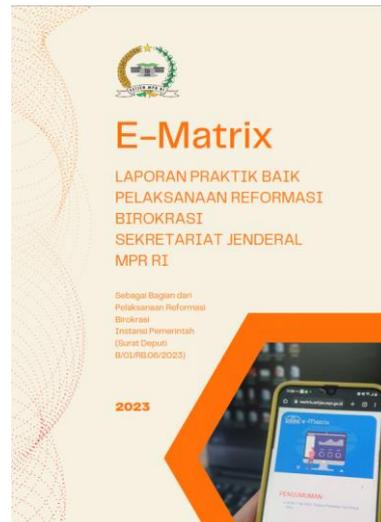
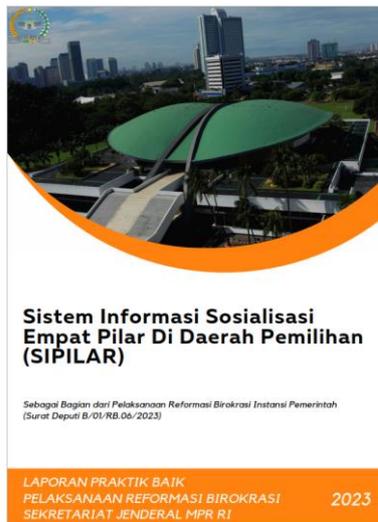
Adapun Sekretariat Jenderal MPR RI melaporkan dua praktik baik RB, yaitu **SIPIAR** (Sistem Informasi Sosialisasi Empat Pilar) dan **E-Matrix**. SIPIAR merupakan inovasi praktik baik yang membuat pengelolaan kegiatan pengelolaan Sosialisasi Empat Pilar menjadi berbasis digital sehingga lebih efektif dari segi pelaksanaan proses pengajuan dan pengolahan data, serta

lebih efisien dari segi waktu dan mengurangi penumpukan dokumen yang tidak perlu. Sedangkan E-Matrix merupakan inovasi praktik baik dalam pendataan kegiatan perjalanan dinas,

sekaligus pemantauan proses transfer dana realisasi perjalanan dinas untuk menghindari terjadinya rangkap pembiayaan perjalanan dinas antara MPR, DPR, dan DPD.



Rapat Penyampaian Praktik Baik Tahun 2023



Laporan Praktik Baik Pelaksanaan RB Tahun 2023

2. Penajaman Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2020 – 2024

Dinamika kebijakan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI untuk semakin adaptif dan lincah. Untuk merespon hal tersebut, pada tahun

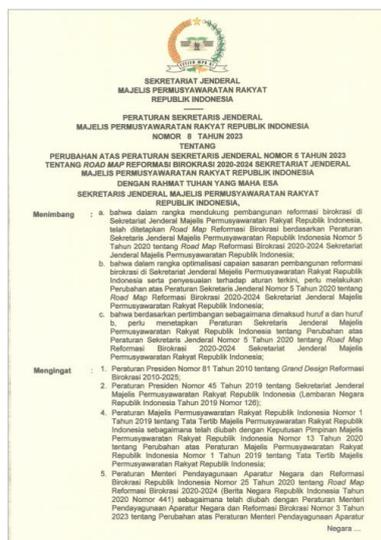
2023 Sekretariat Jenderal MPR RI telah menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 Sekretariat Jenderal MPR RI.

Secara umum, dokumen Roadmap tersebut mengatur mengenai:

- a. Penetapan Tujuan dan Sasaran RB Sekretariat Jenderal MPR RI.
- b. Perencanaan RB General Sekretariat Jenderal MPR RI, yang meliputi penetapan prioritas kegiatan utama, penetapan target kegiatan utama, serta penetapan tema dan target RB Tematik Sekretariat Jenderal MPR RI.
- c. Pelaksanaan RB Sekretariat Jenderal MPR RI, yang meliputi Rencana Aksi RB General, Rencana Aksi RB Tematik, manajemen pelaksanaan RB, dan strategi pelaksanaan Rencana Aksi.

- d. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB Sekretariat Jenderal MPR RI, yang meliputi evaluasi internal RB dan evaluasi eksternal RB.

Secara garis besar, dokumen *Roadmap* sudah sesuai dengan yang diatur pada peraturan di atasnya. Namun secara khusus, pada RB Tematik terdapat dua tema (dari empat pilihan) yang menjadi fokus dalam pelaksanaan RB di Sekretariat Jenderal MPR RI, yaitu Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan Peningkatan Produk Dalam Negeri (PDN).



Penajaman Roadmap RB Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2020 – 2024



Rapat Penyusunan Rencana Aksi RB General



Rapat Penyusunan Rencana Aksi RB Tematik

3. Penyesuaian dokumen penjenjangan kinerja

Penajaman Roadmap RB Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2020 – 2024 turut berdampak pada penyesuaian penjenjangan kinerja (*cascade down*), dimana target kinerja eselon I sampai tingkat eselon IV yang berkaitan dengan Indeks RB disesuaikan sesuai komponen penilaian yang baru. Sehingga, meskipun mekanisme penilaian serta rincian indikator mengalami perubahan, Sekretariat Jenderal MPR RI tetap optimis target nilai yang sudah ditentukan pada dokumen Rencana Strategis tetap

tercapai. Perubahan ini tentunya turut berdampak pada strategi pencapaian kinerja, serta kerangka kerja program dan kegiatan yang ada di masing-masing unit kerja

Adapun proses penyesuaian target kinerja turut melibatkan Bappenas dan Kementerian Keuangan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku. Usulan penyesuaian Rencana Kerja juga telah disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI melalui surat nomor B-271/PR.01/B-II/SetjenMPR/11/2023 tanggal 16 November 2023 kepada Menteri PPN dan Menteri Keuangan.

IKSS 3: Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI

REALISASI KINERJA TINGKAT PEMENUHAN LAYANAN INTERNAL SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI		99.52
TARGET PK	95.00	tercapai 104.76%
TARGET RENSTRA	88.00	tercapai 113.09%
TARGET JANGKA MENENGAH (2024)	90.00	terpenuhi 110.58%
REALISASI 2021	99.58	menurun 0.06

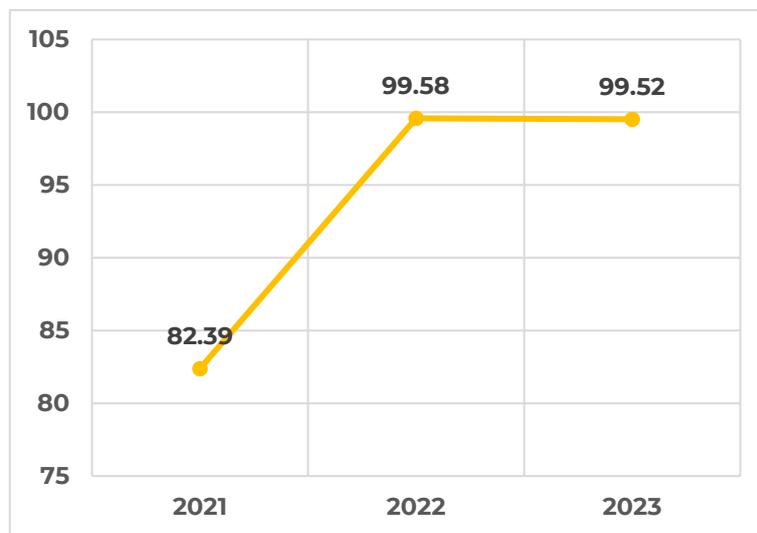
Indikator tingkat pemenuhan layanan internal dirumuskan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana kapasitas dan kapabilitas Sekretariat Jenderal MPR RI dalam memenuhi kebutuhan Pimpinan dan Anggota MPR RI, serta kebutuhan harian unit kerja lainnya. Kebutuhan yang dimaksud adalah permintaan layanan yang bersifat rutin dan harian. Layanan juga mengikuti karakteristik organisasi dan berbasis pada kebuhan pengguna layanan.

Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2023, nilai **Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI** adalah **99.52 persen**. Realisasi ini memenuhi target pada dokumen Perjanjian Kinerja, yaitu 95.00 persen dengan capaian sebesar 104.76 persen. Jika disandingkan dengan target tahun 2023 pada dokumen Rencana Strategis sebesar 88.00 persen, maka capaiannya yaitu 113.09 persen. Jika disandingkan dengan target jangka

menengah atau target 2024 yang tercantum pada dokumen Rencana Strategis sebesar 90.00, maka target tersebut sudah tercapai dengan capaian 110.58 persen. Meskipun secara keseluruhan seluruh target tercapai, namun nilai ini sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan

realisasi tahun 2022 yaitu 99.58 persen atau menurun 0.06 persen. Adapun perkembangan nilai Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat digambarkan sebagaimana berikut.

GRAFIK 3.16 TREN CAPAIAN IKSS-3 TAHUN 2021 – 2023



Meskipun indikator ini tercantum dalam dokumen Rencana Strategis, namun indikator ini baru tercantum di dokumen Perjanjian Kinerja dan diukur capaiannya pada tahun 2021. Berdasarkan grafik 3.16 dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari capaian tahun 2021 ke capaian tahun 2022. Hal ini dikarenakan terjadi penyesuaian mekanisme pengukuran indikator dan pengumpulan data kinerja sehingga pada dasarnya capaian tahun 2022 dan

tahun 2023 tidak bisa disandingkan dengan capaian tahun 2021.

Pengukuran IKSS-3 dilakukan dengan membandingkan jumlah layanan yang dipenuhi terhadap jumlah permintaan layanan yang masuk. Pengukuran ini dilaksanakan secara komprehensif pada seluruh layanan yang ada di Program Dukungan Manajemen atau seluruh unit kerja yang ada di bawah Deputy Bidang Administrasi. Adapun detail jumlah layanan yang terpenuhi dijabarkan dalam tabel berikut.

GRAFIK 3.17

REKAPITULASI TINGKAT PEMENUHAN LAYANAN INTERNAL SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2023

KODE	KEGIATAN	PERMINTAAN	PEMENUHAN	SATUAN	%
	TINGKAT PEMENUHAN LAYANAN				99.52%
1001	Pengelolaan Administrasi dan Fasilitas Reformasi Birokrasi				98.62%
	Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum				98.62%
1	Bagian Sumber Daya Manusia				100.00%
	Layanan kesehatan	10,270	10,270	pasien	100.00%
2	Bagian Persuratan dan Kearsipan				94.47%
	Layanan persuratan	960	960	pengiriman	100.00%
	Layanan pengelolaan ekspedisi	4,077	3,401	ekspedisi	83.42%
	Layanan penjilidan dan penggandaan	178	178	kali	100.00%
3	Bagian Hukum				100.00%
	Layanan penyusunan produk hukum	226	226	produk	100.00%
	Layanan advokasi hukum	4	4	advokasi	100.00%
	Layanan telaahan hukum	9	9	telaahan	100.00%
	Layanan informasi hukum	2	2	informasi	100.00%
4	Layanan Rapat Kerja				100.00%
	Layanan Rapat Kerja Terbatas	8	8	rapat	100.00%
	Layanan Rapat Kerja Sekretariat Jenderal	4	4	rapat	100.00%
	Layanan Rapat Koordinasi	5	5	rapat	100.00%
	Layanan Rapat Koordinasi Teknis	9	9	rapat	100.00%
1002	Pengelolaan Administrasi, Publikasi, dan Layanan Informasi				100.00%
	Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi				100.00%
1	Bagian Sistem Informasi dan Data				100.00%
	Layanan pemeliharaan jaringan	529	529	layanan	100.00%
2	Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga				100.00%
	Layanan peliputan dan publikasi	292	292	peliputan	100.00%
	Layanan penerimaan delegasi masyarakat	71	71	delegasi	100.00%

KODE	KEGIATAN	PERMINTAAN	PEMENUHAN	SATUAN	%
3	Bagian Media Visual dan Audio Visual				100.00%
	Layanan media visual dan audio visual	1,311	1,311	layanan	100.00%
4	Bagian Perpustakaan				100.00%
	Layanan peminjaman bahan pustaka	68	68	kali	100.00%
	Layanan perpustakaan	5,138	5,138	pengunjung	100.00%
1003	Pengelolaan Administrasi Perencanaan dan Hak-Hak Keuangan				100.00%
	Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Biro Perencanaan dan Keuangan				100.00%
1	Bagian Perbendaharaan				100.00%
	Layanan verifikasi anggaran dan realisasi pembayaran satker Majelis	4,398	4,398	berkas	100.00%
	Layanan verifikasi anggaran dan realisasi pembayaran satker Setjen	3,525	3,525	berkas	100.00%
2	Bagian Gaji dan Administrasi Perjalanan Dinas				100.00%
	Layanan verifikasi dokumen, serta pembayaran gaji dan tunjangan	226	226	berkas	100.00%
	Layanan verifikasi dan pembayaran perjalanan dinas	3,538	3,538	berkas	100.00%
1014	Pengelolaan Administrasi Sarana dan Prasarana Kantor				99.45%
	Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Biro Umum				99.45%
1	Bagian Pengadaan & Penerbitan				100.00%
	Layanan pengadaan	3,509	3,509	kali	100.00%
	Layanan penerbitan dan penyediaan barang cetakan	471	471	kali	100.00%
2	Bagian Pengelolaan BMN & Akomodasi				98.66%
	Layanan pengelolaan BMN	1,148	1,135	kali	98.87%
	Layanan akomodasi	645	635	kali	98.45%
3	Bagian Pemeliharaan, Instalasi & Angkutan				99.12%
	Layanan pemeliharaan gedung dan taman	419	408	kali	97.37%
	Layanan instalasi mekanikal elektrik	358	358	kali	100.00%
	Layanan pengelolaan angkutan	355	355	kali	100.00%
4	Bagian Pengamanan				100.00%
	Layanan pengamanan dalam	830	830	kali	100.00%

Pengukuran data dilaksanakan terhadap unsur-unsur layanan yang ada pada setiap kegiatan. Layanan kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dengan nilai 98.62 persen diukur berdasarkan tingkat pemenuhan layanan internal Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum. Layanan kegiatan Pengelolaan Administrasi, Publikasi, dan Layanan Informasi dengan nilai 100.00 persen diukur berdasarkan tingkat pemenuhan layanan internal Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi. Layanan kegiatan Pengelolaan Administrasi Perencanaan dan Hak-Hak Keuangan dengan nilai 100.00 persen diukur berdasarkan tingkat pemenuhan layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan. Layanan kegiatan Pengelolaan Administrasi Sarana dan Prasarana Kantor dengan nilai 99.45 persen diukur berdasarkan tingkat pemenuhan layanan internal Biro Umum. Adapun **hal-hal yang telah dilakukan** oleh Sekretariat Jenderal MPR RI, serta **program/kegiatan penunjang** dalam rangka pemenuhan layanan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Layanan Internal Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Layanan internal yang diselenggarakan oleh Biro SDM, Organisasi, dan Hukum meliputi

layanan kesehatan, layanan persuratan, layanan hukum, dan layanan rapat kerja. Layanan kesehatan meliputi permintaan pasien terhadap layanan poliklinik umum, poliklinik gigi, fisioterapi, dan laboratorium. Layanan persuratan meliputi pengelolaan persuratan, pengelolaan ekspedisi (kegiatan pengiriman bahan, pengepakan bahan, serta pengiriman surat), serta penjilidan dan penggandaan.

Layanan hukum meliputi layanan penyusunan produk hukum (Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia), advokasi hukum, telaahan hukum (terhadap dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Jenderal MPR dengan perguruan tinggi atau lembaga riset, dan informasi hukum. Layanan Rapat Kerja meliputi Rapat Kerja Terbatas, Rapat Kerja Sekretariat Jenderal, Rapat Koordinasi, dan Rapat Koordinasi Teknis.



Layanan Medical Check-Up yang diselenggarakan oleh Poliklinik Sekretariat Jenderal MPR RI bekerjasama dengan Laboratorium Klinik Pramita

b. Layanan Internal Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi

Pada lingkup layanan internal Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi, layanan yang diberikan meliputi layanan pemeliharaan jaringan, layanan peliputan dan publikasi, layanan penerimaan delegasi masyarakat, layanan media visual dan audio visual, layanan peminjaman bahan pustaka, dan layanan perpustakaan.

Pada layanan pemeliharaan jaringan, layanan yang diberikan merupakan layanan <https://helpdesk.setjen.mpr.go.id> / perbaikan jaringan dan internet yang meliputi perbaikan koneksi internet/LAN, instalasi, aplikasi

penunjang kinerja, email, printer, virus/antivirus, penyingkat tautan, dan perbaikan hal lain yang terkait. Layanan peliputan dan publikasi merupakan layanan yang dilaksanakan oleh wartawan majelis, dan layanan penerimaan delegasi masyarakat merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat luas yang ingin melakukan kunjungan ke MPR. Layanan media visual dan audio visual dilaksanakan dalam rangka pendokumentasian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MPR RI ataupun Sekretariat Jenderal MPR RI. Adapun untuk layanan perpustakaan, perhitungan didasarkan pada layanan data peminjaman bahan pustaka dan layanan perpustakaan.



Layanan Penerimaan Delegasi oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi

c. Layanan Internal Biro Perencanaan dan Keuangan

Layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan diukur berdasarkan data register berkas yang ditarik dari aplikasi internal keuangan Sekretariat Jenderal MPR RI yaitu Sintag. Data register berkas yang tercatat menggambarkan layanan verifikasi dan realisasi pembayaran yang dilakukan pada seluruh berkas kegiatan untuk memastikan bahwa berkas yang telah disusun oleh unit kerja telah

sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang berlaku sebelum masuk kepada proses pembayaran di loket yang telah disediakan. Layanan verifikasi dan pembayaran dilakukan pada satker Majelis (Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan) dan satker Setjen (Program Dukungan Manajemen), serta pada komponen gaji dan tunjangan, serta pembayaran perjalanan dinas.



Layanan Loket Pembayaran Biro Perencanaan dan Keuangan

d. Layanan Internal Biro Umum

Tingkat pemenuhan layanan internal Biro Umum diukur berdasarkan layanan pengadaan, layanan penerbitan dan penyediaan barang cetakan, pengelolaan BMN, akomodasi, pemeliharaan gedung dan taman, instalasi mekanikal elektrikal, pengelolaan angkutan, dan pengamanan dalam. Secara lebih rinci lagi, layanan pengelolaan BMN meliputi permintaan ATK,

permintaan atau pendistribusian BMN, dan permintaan seminar kit atau tas. Layanan akomodasi meliputi layanan permintaan ruang rapat, permintaan petugas dan perlengkapan akomodasi, permintaan perlengkapan, dan penataan ruang kerja. Layanan angkutan meliputi pemeliharaan terhadap kendaraan dinas dan kendaraan sewa, sehingga dapat digunakan secara optimal ketika ada permintaan penggunaan.



Layanan Pemeliharaan Gedung dan Taman yaitu Peninjauan Lokasi dalam rangka Renovasi Mess Bandung

Dapat disimpulkan bahwa kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI dalam memberikan layanan internal berjalan dengan baik di tahun 2023. Hal ini dikarenakan tingkat pemenuhan layanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI hampir seluruhnya mencapai 100 persen. Namun, Sekretariat Jenderal MPR RI akan terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan dengan memprioritaskan unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan

unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan. Pada tahun 2024, Sekretariat Jenderal MPR RI akan berfokus untuk merumuskan berbagai inovasi perbaikan dan melaksanakan akselerasi pada layanan dengan tingkat pemenuhan yang tidak mencapai 100 persen, yaitu layanan pengelolaan ekspedisi (83.42 persen), layanan pengelolaan BMN (98.87 persen), layanan akomodasi (98.45 persen), serta layanan pemeliharaan gedung dan taman (97.37 persen).

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal MPR Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran sesuai nilai pagu setelah revisi. Realisasi anggaran sepanjang tahun 2023 dipergunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan dokumen Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun Anggaran 2023 *Unaudited*, capaian kinerja anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI untuk tahun 2023 adalah sebesar 94,17 persen, dengan realisasi sejumlah Rp. 863,930,509,516 dari pagu Rp. 917,377,288,000. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

TABEL 3.18

REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2023

KODE	URAIAN	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI	%
CF	PROGRAM PENYELENGGARAAN LEMBAGA LEGISLATIF DAN ALAT KELENGKAPAN	652,213,418,000	624,329,548,689	95.72%
1008	Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR	75.390.948,000	69.033.248,911	91.57%
5002	Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR	391.626.284,000	379.495.552.147	96.90%
5003	Pengkajian Kemajelisan	144.588.237,000	137.778.191.480	95.29%
5728	Penganggaran MPR	25.084.642,000	24.062.302,076	95.92%
6487	Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI	15.523.307,000	13,960.254.075	89.93%
WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	265,163,870,000	239,600,960,827	90.36%
1001	Pengelolaan Administrasi dan Reformasi Birokrasi	13,183,823,000	12,165,617,602	92.28%
1002	Pengelolaan Administrasi, Publikasi, dan Layanan Informasi	28,007,500,000	25,661,630,160	91.62%
1003	Pengelolaan Administrasi Perencanaan dan Hak-Hak Keuangan	139,127,111,000	128,794,375,260	92.57%
1014	Pengelolaan Administrasi Sarana dan Prasarana Kantor	83,819,285,000	72,001,234,824	85.90%
6485	Pengelolaan Administrasi dan Pengendalian Internal	1,026,151,000	978,102,981	95.32%
TOTAL		917,377,288,000	863,930,509,516	94.17%

Jika melihat tren realisasi anggaran terhadap pagu, dapat terlihat bahwa sejak tahun 2020 persentase realisasi anggaran terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan, meskipun pada tahun 2023 sedikit menurun. Hal ini

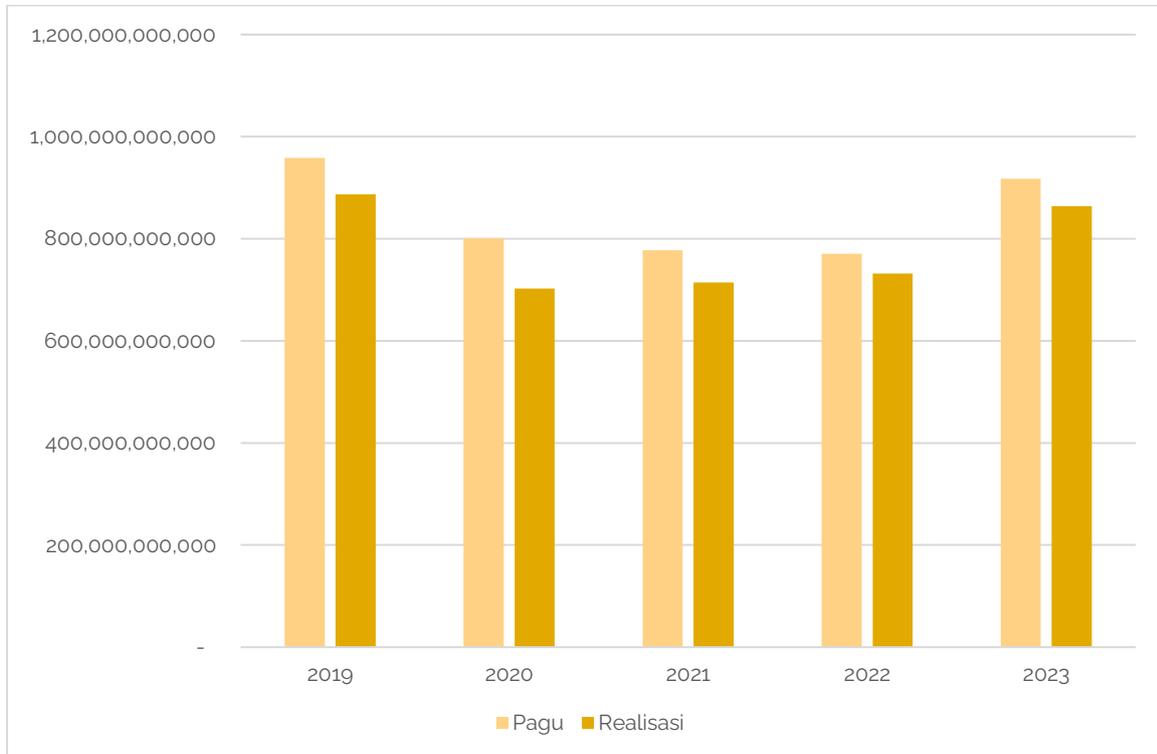
dikarenakan Sekretariat Jenderal MPR RI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penggunaan anggaran serta mendorong realisasi penggunaan anggaran melalui forum monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara

rutin setiap triwulan. Adapun tren realisasi anggaran dari tahun 2019

sampai dengan 2023 dapat digambarkan sebagaimana berikut.

GRAFIK 3.19

TREN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2019 – 2023



C. EVALUASI DAN UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka menjaga kualitas kinerja, Sekretariat Jenderal MPR RI secara rutin melakukan evaluasi internal untuk melihat faktor utama yang mendukung ataupun menghambat pencapaian target kinerja. Selain itu, Sekretariat Jenderal MPR RI juga secara konsisten

berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja kepada *stakeholder* dan *customer* melalui berbagai program dan menindaklanjuti beberapa penilaian yang dilakukan pihak eksternal.

1. Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

TABEL 3.20

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS		CAPAIAN SASARAN STRATEGIS	PAGU ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	DEVIASI
SS-1	Meningkatnya kepuasan MPR RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Setjen MPR RI	102.35%	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif Dan Alat Kelengkapan	95.72%	6.63
SS-2	Terwujudnya birokrasi Setjen MPR RI berkelas dunia	95.22%	Program Dukungan Manajemen	90.36%	4.86
CAPAIAN KINERJA		98.79%	CAPAIAN ANGGARAN	94.17%	4.62

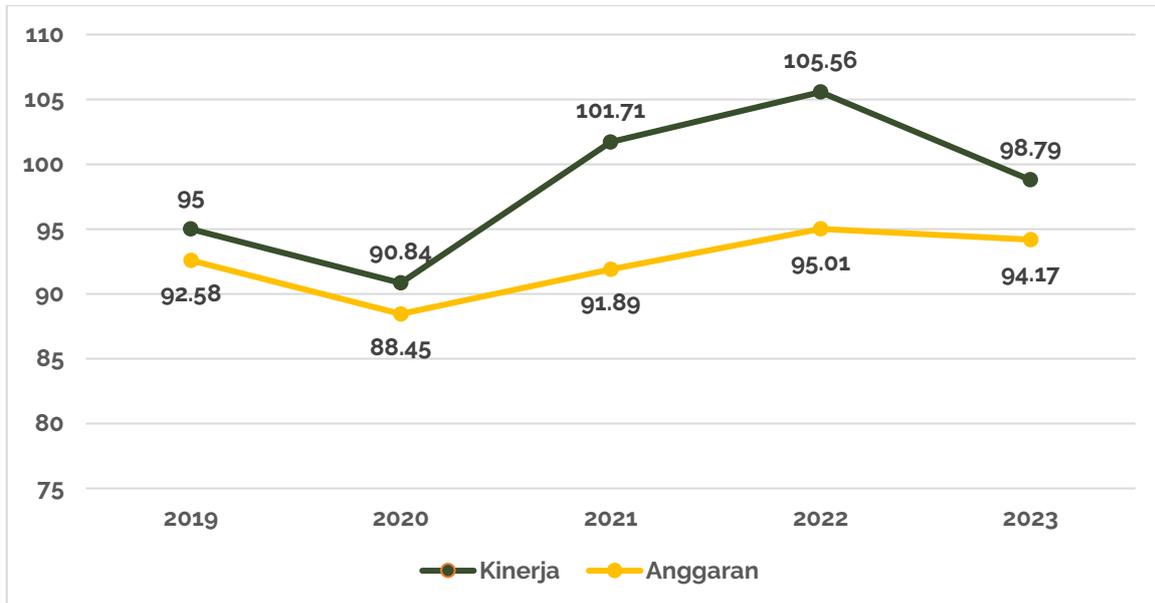
Capaian kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2023 yaitu 98.79 persen dengan capaian anggaran sebesar 94.17 persen, sehingga deviasi antara capaian kinerja dan anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2023 yaitu 4.62. Sasaran strategis pertama yaitu "Meningkatnya kepuasan MPR RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Setjen MPR RI" didukung oleh Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan dengan capaian kinerja 102.35 persen dan capaian anggaran 95.72 persen, sehingga angka deviasinya adalah 6.63. Sasaran strategis kedua yaitu "Terwujudnya birokrasi Setjen MPR RI berkelas dunia"

didukung oleh Program Dukungan Manajemen dengan capaian kinerja 95.22 persen dan capaian anggaran 90.36 persen, sehingga angka deviasinya adalah 4.86.

Berdasarkan hasil perbandingan kinerja capaian kinerja dan anggaran Sekretariat Jenderal MPR tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal MPR RI telah mampu mencapai sasaran kinerja dengan pelaksanaan anggaran yang efisien, namun masih diperlukan beberapa upaya perbaikan supaya angka deviasi antara capaian kinerja dan anggaran tidak terlalu jauh atau di bawah 10 persen.

GRAFIK 3.21

TREN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2019 – 2023



Jika menyangdingkan data perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran tahun 2019 – 2023, celah antara capaian kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun 2023 sangat mengecil, yang menunjukkan adanya upaya perbaikan pelaksanaan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi perbaikan dalam hal-hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Adapun tren datanya dapat dilihat pada gambar berikut.

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sekretariat Jenderal MPR RI senantiasa melakukan penguatan tata kelola agar pelaksanaan kinerja semakin efektif dan efisien, salah satunya dalam bentuk efisiensi anggaran dan optimalisasi potensi sumber daya manusia yang ada.

Salah satu cara untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran adalah dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran.

Tata cara pengukuran dan penilaian efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan mengadopsi rumus yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

TABEL 3.22

NILAI EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2023

PROGRAM	COP PER PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (AA)	REALISASI ANGGARAN (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif Dan Alat Kelengkapan	102.35%	652,213,418,000	624,329,548,689	667,540,433,323	43,210,884,634
Program Dukungan Manajemen	95.22%	265,163,870,000	239,600,960,827	252,489,037,014	12,888,076,187
JUMLAH		917,377,288,000	863,930,509,516	920,029,470,337	56,098,960,821
				$\Sigma ((AA \times COP) - RA) / \Sigma (AA)$	6.12%

Berdasarkan rumus tersebut, **nilai efisiensi penggunaan anggaran** Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2023 adalah sebesar **6.12 persen**. Nilai tertinggi efisiensi output program adalah 20 persen dan nilai terendah adalah -20 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa **penggunaan anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI terhadap capaian kinerja tergolong efisien**. Selain membandingkan dengan capaian kerja, Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun 2023 juga melakukan beberapa upaya dalam rangka efisiensi anggaran, antara lain:

- a. Realokasi anggaran atau **automatic adjustment belanja pegawai** dari BA MPR ke BA BUN sebesar Rp. 4.700.000.000.
- b. **Penghematan anggaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**, sisa anggaran yang tersisa kemudian dioptimalisasi untuk kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian indikator Perjanjian Kinerja. Adapun ketentuan pembentukan tim yang

diberikan honorarium pada tahun 2023 telah memenuhi ketentuan berikut:

- 1) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- 2) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I/Kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah lainnya;
- 3) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- 4) khusus untuk pejabat negara/pegawai ASN diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan di samping tugas pokoknya sehari-hari;
- 5) dilakukan secara efektif dan efisien;
- 6) pembentukannya merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- 7) terhadap tim yang akan dibentuk harus melalui proses revidi Inspektorat untuk mengecek keabsahan pembentukannya.

Selain melalui efisiensi anggaran, pada tahun 2023 Sekretariat Jenderal MPR RI juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya melalui optimalisasi sumber daya manusia internal. Adapun beberapa tindakan yang dilakukan, antara lain:

a. Pengembangan kompetensi

Upaya pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI dilaksanakan berdasarkan dua cara, yaitu penyelenggaraan pelatihan secara daring dan luring, serta penyelenggaraan ujian dinas. Pada tahun 2023, Sekretariat Jenderal MPR telah menyelenggarakan 18 (delapan belas) pelatihan teknis dengan total peserta pelatihan sebanyak 215 (dua ratus lima belas) orang. Selain itu, Sekretariat Jenderal MPR RI juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan struktural, yaitu Pelatihan Kepemimpinan Administrator untuk 1 orang dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas untuk 8 orang. Adapun untuk ujian dinas yang dilakukan pada tahun 2023 yaitu Ujian Dinas Tingkat I yang diikuti oleh 19 (sembilan belas) orang dan Ujian Dinas Tingkat II yang diikuti oleh 1 (satu) orang.

Upaya pembinaan dan pengembangan pegawai ini dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan suatu sistem pengelolaan SDM yang komprehensif dengan menyesuaikan karakter organisasi.

b. Penataan kompetensi SDM

Sekretariat Jenderal MPR RI melakukan penataan kompetensi SDM setidaknya melalui dua cara, yaitu rekrutmen ASN dan redistribusi pegawai melalui mutasi/rotasi dan promosi. Terkait proses rekrutmen ASN, beberapa langkah yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun 2023, yaitu:

- a. Penyampaian kebutuhan ASN tahun 2024 sebanyak 44 orang. Jumlah tersebut diperoleh dengan mempertimbangkan jumlah pegawai yang ada saat ini, jumlah pegawai yang akan pensiun, serta jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan ABK.
- b. Pengajuan usulan kebutuhan ASN formasi PPPK tahun anggaran 2023 sebanyak 17 formasi, yaitu 12 formasi PPPK teknis dan 5 formasi PPPK tenaga kesehatan.
- c. Penerimaan formasi PPPK tahun anggaran 2022 yang berlanjut pada tahun 2023 sebanyak 5 formasi dari 13

formasi (8 formasi tidak terisi karena tidak memenuhi *passing grade*).

- d. Penerimaan formasi PPPK tahun anggaran 2023 sebanyak 14 formasi dari 17 formasi (3 formasi tidak terisi).
- e. Pengangkatan CPNS menjadi PNS sebanyak 29 orang dan pengangkatan PPPK sebanyak 5 orang.
- f. Pengangkatan jabatan fungsional sebanyak 6 orang. Pengalihan ini dilakukan melalui proses pemetaan dan identifikasi jabatan yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang disetarakan untuk kemudian disesuaikan dalam kedudukan, tugas, dan fungsi di struktur organisasi dan tata kerja yang baru.

Di sisi lain, Sekretariat Jenderal MPR RI juga secara aktif melakukan redistribusi pegawai sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan melalui optimalisasi SDM yang tersedia di internal organisasi. Melalui redistribusi pegawai, diharapkan alokasi sumber daya manusia dapat lebih tepat, sehingga formasi jabatan yang ada di tiap unit kerja terisi sesuai kebutuhan organisasi dan aspirasi karir pegawai.

Redistribusi pegawai antar unit kerja dilaksanakan melalui mekanisme *assessment* yang bertujuan untuk memberikan informasi yang *fair* dan objektif dalam rangka rotasi dan promosi jabatan administrator dan pengawas. Selain itu, hasil *assessment* juga dimanfaatkan sebagai dasar dalam menyusun rencana pengembangan pegawai sehingga secara bertahap dan berkesinambungan kompetensi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI dapat ditingkatkan. Hasil *assessment* juga dikalibrasi dengan hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai yang dinilai rutin setiap triwulan untuk memvalidasi keandalan data.

Total Pejabat dan Pegawai yang mengikuti *assessment* adalah 175 orang. Berdasarkan hasil *assessment*, Sekretariat Jenderal MPR RI telah melaksanakan promosi terhadap 5 orang dari Jabatan Pelaksana ke Jabatan Pengawas, 4 orang dari Jabatan Pengawas ke Jabatan Administrator, dan kenaikan jenjang untuk 2 orang Jabatan Fungsional Pustakawan. Adapun mutasi/rotasi dilakukan kepada 27 pegawai, yaitu 4 orang JPT Pratama, 15 orang Jabatan Administrator, dan 18 orang Jabatan Pengawas.

3. Tindak Lanjut LKIP 2022

Salah satu sub-komponen pada evaluasi AKIP terhadap komponen Pelaporan Kinerja adalah bagaimana hasil dari Laporan Kinerja memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Salah satu perubahan yang paling berdampak adalah terkait penyesuaian target kinerja pada IKSS-3 Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI. Hasil pengukuran Laporan Kinerja Tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian terhadap indikator tersebut sangat melebihi target, yaitu realisasi 99,58 persen dari target 87,00 persen. Berdasarkan hasil tersebut, pada tahun 2023 Sekretariat Jenderal MPR RI melakukan penyesuaian target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada dokumen Rencana Strategis tercantum

bahwa target kinerja tahun 2023 terhadap IKSS-3 adalah 89 persen, namun pada dokumen Perjanjian Kinerja target tersebut disesuaikan menjadi 95 persen.

Selain penyesuaian target, Sekretariat Jenderal MPR RI juga melaksanakan rencana aksi sebagaimana yang tercantum pada bab IV Laporan Kinerja Tahun 2022. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan untuk menunjukkan bahwa informasi dalam Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR tahun 2022 turut menjadi perhatian utama Pimpinan dan digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, serta mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Secara lebih detail, pelaksanaan rencana aksi dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.23 TINDAK LANJUT RENCANA AKSI LKIP 2022

NO	RENCANA AKSI	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN
IKSS-1	Indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan Setjen MPR RI		
1	Pelaksanaan <i>monitoring</i> rutin terhadap sarana dan prasarana yang digunakan langsung oleh Pimpinan dan Anggota MPR.	Deputi Bidang Administrasi / Biro Umum	Monitoring rutin dilaksanakan oleh dua bagian di Biro Umum. Bagian Barang Milik Negara dan Akomodasi bertugas memastikan inventaris ruangan sesuai dengan DIR (daftar inventaris ruangan). Bagian Pemeliharaan, Instalasi, dan Angkutan bertugas memastikan fungsi sarana dan prasarana melalui pemeriksaan secara berkala.
2	Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menjawab keluhan yang dialami	Deputi Bidang Administrasi / Biro Umum dan seluruh Biro di	Penguatan koordinasi telah dilakukan secara rutin melalui proses komunikasi antar pemangku kepentingan secara intensif, namun sejauh ini masih pada tahap informal.

NO	RENCANA AKSI	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN
	oleh Pimpinan dan Anggota MPR terkait sarana dan prasarana.	Deputi Bidang P2K	
IKSS-2	Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI		
1	Melaksanakan uji coba implementasi manajemen talenta di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2020	Deputi Bidang Administrasi / Biro SDM, Organisasi, dan Hukum	Pada tahun 2023, penilaian talenta telah dilakukan melalui input data Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator pada aplikasi SIMATA (Sistem Manajemen Talenta). Berdasarkan hasil penginputan, telah didapatkan 10 talenta yang berada pada kotak 7, 8, dan 9 atau pegawai yang masuk dalam kelompok rencana suksesi instansi.
2	Menetapkan dan merevisi Peraturan Sekretaris Jenderal MPR terkait pengelolaan pengaduan dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Inspektorat	Inspektorat telah menyusun rancangan revisi Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI terkait pengelolaan pengaduan, namun belum selesai ditindaklanjuti di tahun 2023.
3	Membentuk kelompok kerja atau tim untuk mengidentifikasi unit kerja yang akan diusulkan untuk pembangunan Zona Integritas	Inspektorat	Inspektorat telah melakukan penelaahan dan diskusi dengan Bagian Ortala untuk menentukan unit kerja yang akan diusulkan, namun baru akan usulan tersebut baru akan disampaikan di tahun 2024.
4	Membentuk kelompok kerja atau tim untuk melakukan <i>self-assessment</i> pada unit-unit terkait pengelolaan aspek hasil antara area perubahan sehingga koordinasi dengan <i>leading sector</i> dapat dilaksanakan secara lebih optimal	Seluruh Biro di Deputi Bidang Administrasi	Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal atau <i>Strategic Transformation Unit</i> telah berkoordinasi dengan unit kerja terkait gap antara target dan capaian aspek hasil antara area perubahan, serta telah menentukan prioritas kegiatan utama sesuai mekanisme evaluasi RB yang baru.
IKSS-3	Tingkat pemenuhan layanan internal Sekretariat Jenderal MPR RI		
1	Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan layanan ekspedisi, khususnya dalam rangka penyusunan <i>timeline</i> bersama pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar dari hulu (penyusunan dan pengadaan bahan) sampai hilir (ekspedisi bahan).	Deputi Bidang Administrasi / Biro SDM, Organisasi, & Hukum dan Biro Umum – Deputi Bidang P2K / Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi	Sekretariat Jenderal MPR RI telah melakukan Rapat Kerja antara: 1) Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi; 2) Bagian Pengadaan dan Penerbitan; 3) Bagian Pengelolaan BMN dan Akomodasi; serta 4) Subbagian Persuratan, Ekspedisi, dan Penggandaan. Agenda Rapat Kerja khususnya membahas terkait evaluasi kegiatan, serta rencana kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di Daerah Pemilihan ke depan.
2	Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan layanan BMN, khususnya untuk perbaikan RKBMN sesuai tren permintaan dan hasil identifikasi kebutuhan <i>real</i> dari masing-masing unit kerja.	Deputi Bidang Administrasi / Biro Umum	Perbaikan RKBMN telah dilakukan melalui penyelenggaraan forum penelaahan bersama dengan para pemangku kepentingan.

4. Kinerja Lainnya

Sekretariat Jenderal MPR RI memiliki kinerja lain di samping capaian kinerja dan realisasi anggaran yang tergambar berdasarkan penerimaan berbagai penghargaan di tingkat nasional. Akan tetapi pada tahun 2023, sebagian besar penghargaan yang diterima oleh Sekretariat Jenderal MPR RI sudah termasuk dalam komponen Indeks Reformasi Birokrasi yang capaiannya sudah dijelaskan pada subbab Capaian Kinerja. Adapun penghargaan lainnya yang diterima oleh Sekretariat Jenderal MPR RI, meliputi:

1. BKN Award Tahun 2023

Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal MPR RI meraih 4 (empat) penghargaan pada kegiatan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award Tahun 2023 yang diselenggarakan di Bandung

pada tanggal 30 Mei 2023. Keberhasilan ini merupakan wujud dari capaian prestasi dalam penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Adapun penghargaan tersebut meliputi:

- a. Kategori Utama Implementasi NSPK Manajemen ASN terbaik;
- b. Kategori Non-Kementerian Tipe Kecil, Peringkat Kedua Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja;
- c. Kategori Non-Kementerian Tipe Kecil, Peringkat Kelima Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT;
- d. Kategori Non-Kementerian Tipe Kecil, Peringkat Kelima Pengembangan Kompetensi.





2. Tingkat Maturitas Penanganan Insiden Keamanan Siber

Sekretariat Jenderal MPR RI meraih penghargaan Pencapaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden Keamanan Siber dengan nilai **3.19**. Penilaian ini diserahkan

oleh Badan Siber dan Sandi Negara pada kegiatan Penilaian Penyelenggaraan CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) Pemerintah Pusat Tahun 2024 pada tanggal 23 – 24 Mei 2023.



3. KPPN Jakarta VII Award Tahun Anggaran 2023

Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal MPR RI meraih **Peringkat Kedua Satuan Kerja Pengguna Kartu Kredit Pemerintah dengan Nilai Transaksi Terbesar**. Penghargaan

ini diserahkan oleh KPPN Jakarta VII pada Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan KPPN Jakarta VII Award yang bertempat di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 Februari 2024.



4. Keterbukaan Informasi Publik

Pada tahun 2023, Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Hasil pelaksanaan tersebut ditetapkan pada Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 17/KEP/KIP/XII/2023 tentang

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan sebagai badan publik dengan kualifikasi **Cukup Informatif** dengan nilai **79,18** pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.



BAB IV

PENUTUP

Secara umum, Sekretariat Jenderal MPR RI berhasil mencapai target-target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan nilai kinerja sebesar 98.86 persen, sedikit menurun dibandingkan dengan nilai kinerja tahun 2022 sebesar 105.65 persen. Dari tiga indikator kinerja sasaran strategis, hanya terdapat satu indikator yang tidak tercapai, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI yang belum mencapai target.

Transformasi dan perbaikan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023 akan menjadi modal dasar untuk mendorong pencapaian sasaran dan indikator jangka menengah yang harus dicapai pada tahun 2024. Guna mendukung hal tersebut, Sekretariat Jenderal MPR RI merumuskan rencana aksi yang didasarkan pada analisis capaian kinerja pada setiap indikator sebagai berikut.

TABEL 4.1 RENCANA AKSI LKIP 2023

NO	RENCANA AKSI	UNIT PENANGGUNG JAWAB
IKSS-1	Indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan Setjen MPR RI	
1	Menciptakan inovasi agar tercipta wadah bagi Pimpinan dan Anggota MPR RI untuk memberikan Pengaduan, Saran, dan Masukan terkait kinerja yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI.	Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi
IKSS-2	Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI	
2	Penelaahan hasil evaluasi RB sehingga dapat dipetakan indikator yang perlu dijadikan prioritas di tahun 2024.	Deputi Bidang Administrasi
IKSS-3	Tingkat pemenuhan layanan internal Sekretariat Jenderal MPR RI	

NO	RENCANA AKSI	UNIT PENANGGUNG JAWAB
3	Pemetaan, penelaahan, dan penghitungan ulang terkait seluruh kebutuhan layanan internal berdasarkan data tren layanan tahun 2019 – 2023 agar layanan yang diberikan dapat lebih presisi dan tepat sasaran.	Deputi Bidang Administrasi

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen akan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Jenderal MPR RI berharap Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023 dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai

target kinerja yang telah ditentukan. Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI sehingga berdampak positif dalam mendukung pelaksanaan tugas konstitusional MPR RI sebagai *stakeholder* utama layanan Sekretariat Jenderal MPR RI.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS JENDERAL MPR TAHUN 2023



SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA

UNIT ORGANISASI ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
TAHUN ANGGARAN : 2023

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)
Meningkatnya kepuasan MPR RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Setjen MPR RI	Indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan Setjen MPR RI	3,4 (Indeks)
Terwujudnya Birokrasi Setjen MPR RI Berkelas Dunia	Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI	80,4 (Nilai)
	Tingkat pemenuhan layanan internal Sekretariat Jenderal MPR RI	95 (Persen)

1. Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan Rp. 652.213.418.000
2. Program Dukungan Manajemen Rp. 265.163.870.000

Jakarta, Desember 2023
Plt. Sekretaris Jenderal,

SITI FAUZIAH, S.E., M.M.
NIP. 19651129 199103 2 002

LAMPIRAN 2

REALISASI RINCIAN OUTPUT DAN ANGGARAN

KODE	URAIAN	KINERJA				ANGGARAN		
		TARGET	SATUAN	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
	SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI					917.377.288,000	863.930.512,516	94.17%
WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					265.163.870,000	239.600.963,827	90.36%
1001	Pengelolaan Administrasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi					13.183.823,000	12.165.617,602	92.28%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]					10.153.483,000	9.443.498,828	93.01%
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	1	100.00%	806.495,000	738.672,300	91.59%
962	Layanan Umum	1	Layanan	1	100.00%	9.115.824,000	8.511.922,728	93.38%
969	Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan	1	100.00%	231.164,000	192.903,800	83.45%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line]					2.810.802,000	2.536.305,109	90.23%
954	Layanan Manajemen SDM	1.292	Orang	1.289	99.77%	1.402.882,000	1.204.710,756	85.87%
996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	247	Orang	251	101.62%	1.407.920,000	1.331.594.353	94.58%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]					219.538,000	185.813,665	84.64%
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	11	Laporan	13	118.18%	219.538,000	185.813,665	84.64%
1002	Pengelolaan Administrasi, Publikasi, dan Layanan Informasi					28.007.500,000	25.661.630,160	91.62%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]					26.423.907,000	24.311.080,160	92.00%
958	Layanan Hubungan Masyarakat	72	Laporan	72	100.00%	26.000.947,000	23.938.505,360	92.07%
963	Layanan Data dan Informasi	5	Layanan	5	100.00%	422.960,000	372.574,800	88.09%
FAB	Sistem Informasi Pemerintahan [Base Line]					1.583.593,000	1.350.550,000	85.28%
001	Pembuatan Aplikasi Penunjang Kinerja	3	Sistem Informasi	2	66.67%	545.000,000	343.500,000	63.03%
002	Pengembangan Aplikasi Penunjang Kinerja	9	Sistem Informasi	9	100.00%	1.038.593,000	1.007.050,000	96.96%
1003	Pengelolaan Administrasi Perencanaan dan Hak-hak Keuangan					139.127.111,000	128.794.378,260	92.57%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]					137.035.032,000	127.511.630,216	93.05%
994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	100.00%	137.035.032,000	127.511.630,216	93.05%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]					2.092.079,000	1.282.748,044	61.31%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	47	Dokumen	45	95.74%	396.309,000	230.522,304	58.17%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	23	Dokumen	23	100.00%	701.280,000	441.847,600	63.01%
955	Layanan Manajemen Keuangan	87	Dokumen	87	100.00%	994.490,000	610.378,140	61.38%
1014	Pengelolaan Administrasi Sarana dan Prasarana Kantor					83.819.285,000	72.001.234,824	85.90%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]					54.336.130,000	50.919.093,466	93.71%
956	Layanan BMN	14	Laporan	14	100.00%	1.114.610,000	876.516,346	78.64%
962	Layanan Umum	14	Laporan	14	100.00%	5.409.164,000	5.055.054,654	93.45%
994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	100.00%	47.812.356,000	44.987.522,466	94.09%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]					29.483.155,000	21.082.141,358	71.51%
951	Layanan Sarana Internal	1.271	Unit	908	71.44%	19.904.347,000	13.426.955,608	67.46%
971	Layanan Prasarana Internal	7	Unit	6	85.71%	9.578.808,000	7.655.185,750	79.92%
6485	Pengelolaan Administrasi dan Pengendalian Internal					1.026.151,000	978.102,981	95.32%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]					1.026.151,000	978.102,981	95.32%

KODE	URAIAN	KINERJA				ANGGARAN		
		TARGET	SATUAN	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	11	Dokumen	11	100.00%	694,106,000	661,798,667	95.35%
965	Layanan Audit Internal	14	Dokumen	14	100.00%	332,045,000	316,304,314	95.26%
CF	PROGRAM PENYELENGGARAAN LEMBAGA LEGISLATIF DAN ALAT KELENGKAPAN					652,213,418,000	624,329,548,689	95.72%
1008	Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR					75,390,948,000	69,033,248,911	91.57%
AEA	Koordinasi					69,369,572,000	63,608,663,338	91.70%
001	Penerimaan Tamu Pimpinan MPR RI	2,522	Kegiatan	2,516	99.76%	30,041,270,000	28,168,112,861	93.76%
002	Kunjungan Delegasi Pimpinan MPR RI	517	Kegiatan	575	111.22%	36,449,706,000	33,021,877,337	90.60%
003	Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan Setjen MPR dan Layanan Protokoler	74	Kegiatan	154	208.11%	2,878,596,000	2,418,673,140	84.02%
AEB	Forum					6,021,376,000	5,424,585,573	90.09%
001	Temu Tokoh Nasional/Kepemudaan /Keagamaan/Sivitas Akademika	53	Forum	51	96.23%	4,552,050,000	4,008,724,623	88.06%
002	Pertemuan Tahunan dengan Lembaga Negara dalam Rangka Hari Konstitusi	1	Forum	1	100.00%	1,415,300,000	1,412,010,950	99.77%
003	Forum Majelis Syura Internasional	1	Forum	1	100.00%	54,026,000	3,850,000	7.13%
5002	Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR					391,626,284,000	379,495,552,147	96.90%
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi					391,626,284,000	379,495,552,147	96.90%
001	Pemasyarakatan Konstitusi oleh Anggota MPR	780,900	Orang	780,900	100.00%	326,588,182,000	324,276,388,478	99.29%
002	Pemasyarakatan Konstitusi oleh Badan Sosialisasi MPR	79,950	Orang	73,550	91.99%	65,038,102,000	55,219,163,669	84.90%
5003	PENGAJIAN KEMAJELISAN					144,588,237,000	137,778,191,480	95.29%
ABC	Kebijakan Bidang Politik					144,588,237,000	137,778,191,480	95.29%
001	Kebijakan Sistem Ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pelaksanaannya oleh Badan Pengkajian	2	Rekomen dasi	2	100.00%	22,923,242,000	20,226,511,565	88.24%
002	Kebijakan Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Daerah dan Lembaga	1	Rekomen dasi	1	100.00%	103,588,699,000	99,959,964,969	96.50%
003	Kebijakan Sistem Ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pelaksanaannya oleh Komisi Kajian Ketatanegaraan	2	Rekomen dasi	2	100.00%	18,076,296,000	17,591,714,946	97.32%
5728	Penganggaran MPR					25,084,642,000	24,062,302,076	95.92%
AEA	Koordinasi					25,084,642,000	24,062,302,076	95.92%
001	Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran MPR	273	Kegiatan	273	100.00%	23,788,597,000	22,932,649,246	96.40%
002	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi MPR	15	Kegiatan	15	100.00%	1,296,045,000	1,129,652,830	87.16%
6487	Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR					15,523,307,000	13,960,254,075	89.93%
AEB	Forum					10,059,752,000	9,160,772,302	91.06%
002	Forum Dialog Fraksi/Kelompok DPD	10	Forum	10	100.00%	8,442,952,000	7,651,973,052	90.63%
U01	Forum Konsultasi Fraksi/Kelompok DPD	10	Forum	10	100.00%	1,616,800,000	1,508,799,250	93.32%
BLA	Persidangan Lembaga Legislatif					5,463,555,000	4,799,481,773	87.85%
001	Sidang Tahunan MPR	1	Sidang	1	100.00%	5,463,555,000	4,799,481,773	87.85%

LAMPIRAN 3

CHECKLIST REVIU INSPEKTORAT

INSPEKTORAT
CHEKLIST REVIU
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2023

No	Pernyataan	Chekli st	
I.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Sekretariat Jenderal MPR RI	√
		2. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
		3. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		4. LKj telah menyajikan capaian kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI yang memadai	√
		5. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		6. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
II.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja	√

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Pernyataan		Chekli st
		terkait	
		7. LKj Sekretariat Jenderal MPR RI bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	√
III.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Target Indikator Kinerja Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN 4

DATA IKSS 1: INDEKS KEPUASAN MPR RI TERHADAP DUKUNGAN SETJEN MPR RI

A. CONTOH KUESIONER SKPL (SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN)

**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat 10270,
Telepon 57895063 Faksimili 57895178, website: mpr.go.id

Nomor : B-3/MN.01/A-1/Sejten/MPR/12/2023 Jakarta, 04 Desember 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (berkas)
Hal : Permohonan Pengisian Survei

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
di tempat

Kami beritahukan dengan hormat bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, Sekretariat Jenderal MPR RI bermaksud mengadakan survei kepada Bapak/Ibu Pimpinan MPR RI, berupa Kuesioner Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Sekretariat Jenderal MPR RI.

Pelaksanaan survei ini untuk mengetahui persepsi Bapak/Ibu Pimpinan MPR RI terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI sepanjang tahun 2023, serta untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Pimpinan MPR RI untuk memberikan penilaian yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu layanan Sekretariat Jenderal MPR RI ke depan.

Demikian, kami mengucapkan terima kasih atas perkenan Bapak/Ibu Pimpinan MPR RI memberikan penilaian melalui survei ini.

Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI,

Siti Fauziah

Ditaman di bawah pengawasan secara elektronik yang dilakukan oleh Balai Serifikasi Elektronik (BSE-C) BPSN

**KUESIONER SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN
(SKPL) SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2023**

PETUNJUK PENGISIAN:
Beri tanda centang sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu terhadap setiap pernyataan. Setiap pernyataan diukur menggunakan skala 1-4 dengan keterangan sebagai berikut: 1: tidak setuju, 2: kurang setuju, 3: setuju, 4: sangat setuju

A. LAYANAN KESEKRETARIATAN DAN KEPROTOKOLAN
Deskripsi: layanan yang dimaksud meliputi layanan kesekretariatan (pendampingan kegiatan, penerimaan tamu dan delegasi, administrasi, kerumahtanggaan, serta penyajian materi) dan layanan protokoler (pendampingan keprotokolan, pengurusan paspor dan visa, serta penerjemah).

NO	PERNYATAAN	PERSEPSI			
		1 tidak setuju	2 kurang setuju	3 setuju	4 sangat setuju
1	Persyaratan pemberian layanan oleh Sekretariat mudah dipenuhi.				✓
2	Prosedur layanan oleh Sekretariat mudah dipahami.				✓
3	Sekretariat telah memberikan layanan secara cepat.				✓
4	Layanan yang diberikan Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.				✓
5	Pegawai Sekretariat memiliki kompetensi yang baik dalam memberikan layanan.				✓
6	Pegawai Sekretariat berperilaku baik dalam memberikan layanan.				✓
7	Sekretariat menindaklanjuti saran dan masukan dengan baik.				✓
8	Sekretariat menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.				✓

**KUESIONER SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN
(SKPL) SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2023**

B. LAYANAN KEUANGAN
Deskripsi: layanan keuangan yang dimaksud mencakup layanan pemenuhan kebutuhan hak-hak keuangan.

NO	PERNYATAAN	PERSEPSI			
		1 tidak setuju	2 kurang setuju	3 setuju	4 sangat setuju
1	Persyaratan dan prosedur terkait layanan keuangan mudah dipahami dan dipenuhi.				✓
2	Pemberian layanan keuangan dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				✓
3	Layanan keuangan diberikan secara sopan, informatif, dan responsif.				✓
4	Layanan keuangan diberikan melalui sarana dan prasarana yang memadai.			✓	

C. LAYANAN UMUM
Deskripsi: layanan umum yang dimaksud mencakup layanan akomodasi, pengamanan, pemeliharaan, serta sarana dan prasarana kantor.

NO	PERNYATAAN	PERSEPSI			
		1 tidak setuju	2 kurang setuju	3 setuju	4 sangat setuju
1	Persyaratan dan prosedur terkait layanan umum mudah dipahami dan dipenuhi.				✓
2	Pemberian layanan umum dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				✓
3	Layanan umum diberikan secara sopan, informatif, dan responsif.				✓
4	Layanan umum diberikan melalui sarana dan prasarana yang memadai.			✓	

**KUESIONER SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN
(SKPL) SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2023**

D. LAYANAN KEHUMASAN
Deskripsi: layanan kehumasan yang dimaksud mencakup peliputan, publikasi, teknologi informasi (website dan jaringan), dokumentasi kegiatan (foto/video), serta perpustakaan.

NO	PERNYATAAN	PERSEPSI			
		1 tidak setuju	2 kurang setuju	3 setuju	4 sangat setuju
1	Persyaratan dan prosedur terkait layanan kehumasan mudah dipahami dan dipenuhi.				✓
2	Pemberian layanan kehumasan dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				✓
3	Layanan kehumasan diberikan secara sopan, informatif, dan responsif.				✓
4	Layanan kehumasan diberikan melalui sarana dan prasarana yang memadai.				✓

Tanggal pengisian : Desember 2023

Tanda tangan : 

===

B. DATA SKPL LAYANAN KESEKRETARIATAN PIMPINAN

RESPONDEN	NILAI RATA-RATA PER UNSUR PELAYANAN							
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8
1	4	4	4	4	4	4	4	4
2	3	3	3	2	3	3	2	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	3	3	3	3	3	3
5	4	3	3	4	3	4	3	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	3	4	4	4
8	4	4	4	4	3	4	4	4
9	3	3	3	3	3	3	3	3
10	3	3	3	3	3	3	3	3

C. DATA SKPL LAYANAN KESEKRETARIATAN BADAN SOSIALISASI

RESPONDEN	NILAI RATA-RATA PER UNSUR PELAYANAN							
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8
1.	3	3	3	3	3	3	3	3
2.	3	3	3	4	4	4	3	4
3.	3	3	3	3	3	3	3	3
4.	3	3	3	3	3	3	3	3
5.	4	4	4	4	4	4	4	4
6.	3	3	4	3	4	3	4	3
7.	3	3	3	3	3	3	3	3
8.	4	4	4	4	3	3	3	3
9.	3	3	3	3	3	3	3	3
10.	3	3	3	3	3	3	3	3
11.	3	3	3	3	3	3	3	3
12.	3	3	3	3	3	3	3	4
13.	3	3	3	3	4	4	4	3
14.	4	4	3	3	4	3	3	3
15.	3	3	4	4	3	3	3	3
16.	3	3	3	3	3	3	3	3
17.	4	3	3	3	3	3	3	3
18.	4	4	4	4	4	4	4	4
19.	3	3	3	3	3	3	3	3
20.	4	4	4	3	4	4	4	4
21.	3	3	3	3	4	4	4	4
22.	3	3	4	3	3	3	3	3
23.	3	3	3	4	3	3	3	3
24.	3	3	3	4	3	4	3	3
25.	4	4	4	3	4	3	3	4

D. DATA SKPL LAYANAN KESEKRETARIATAN BADAN PENGAJIAN

RESPONDEN	NILAI RATA-RATA PER UNSUR PELAYANAN							
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8
1.	3	3	3	3	3	4	4	3
2.	4	4	3	4	3	4	3	4
3.	3	3	3	4	3	3	3	3
4.	4	4	4	4	3	3	3	3
5.	3	3	3	3	3	4	3	3
6.	3	3	3	3	3	3	3	3
7.	3	3	3	3	3	3	3	3
8.	4	4	3	3	3	3	3	3
9.	3	3	3	4	3	3	3	3
10.	4	4	3	4	3	4	3	4
11.	3	3	3	4	4	4	3	4
12.	4	4	4	4	4	4	4	4

E. DATA SKPL LAYANAN KESEKRETARIATAN KOMISI KAJIAN KETATANEGARAAN

RESPONDEN	NILAI RATA-RATA PER UNSUR PELAYANAN							
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8
1.	3	3	3	3	3	3	3	4
2.	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	4	4	3	4	4	4	4	4
4.	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	4	4	4	4	4	4	4	4
6.	3	3	4	3	4	3	3	3
7.	4	4	4	4	4	4	4	4
8.	4	4	4	4	4	4	4	4
9.	3	3	4	4	4	4	4	4
10.	2	3	3	3	2	3	3	3
11.	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	4	4	4	4	4	4	4	4
13.	3	3	3	3	4	4	3	4
14.	4	4	4	4	4	4	4	4
15.	3	3	3	3	3	3	3	3
16.	3	3	3	4	3	3	3	3
17.	3	3	3	3	3	3	3	3
18.	4	4	4	4	4	4	4	4
19.	4	4	4	4	4	4	4	4
20.	4	4	4	4	4	4	4	4
21.	3	3	4	4	4	3	4	3
22.	4	3	4	4	3	4	4	4
23.	3	3	4	3	4	4	4	3
24.	3	4	3	4	4	4	3	3
25.	4	3	3	4	3	4	3	4
26.	3	3	3	4	4	4	4	3
27.	4	4	4	4	4	4	4	3
28.	4	4	4	3	4	4	4	4
29.	4	4	4	4	4	4	4	4
30.	4	4	4	4	4	4	4	4
31.	4	4	4	4	4	4	4	4
32.	4	4	4	4	4	4	4	4
33.	4	4	4	4	4	4	4	4
34.	4	4	4	4	4	4	4	4
35.	3	4	3	4	3	4	4	3
36.	4	3	4	3	4	4	3	4
37.	4	4	4	4	4	4	4	4
38.	4	4	4	4	4	4	4	4
39.	4	4	4	4	4	4	4	4

F. DATA SKPL LAYANAN KESEKRETARIATAN BADAN PENGANGGARAN

RESPONDEN	NILAI RATA-RATA PER UNSUR PELAYANAN							
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8
1.	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	3	3	3	3	3	3	3	3
3.	4	4	4	4	4	4	4	4
4.	3	3	3	3	3	3	3	3
5.	4	4	4	4	4	4	4	4
6.	3	3	3	3	3	3	3	3
7.	3	3	3	3	3	3	3	3
8.	3	3	3	3	4	4	3	3
9.	3	4	4	3	3	3	3	3
10.	3	3	4	3	4	4	4	4
11.	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	3	4	4	3	4	4	4	4
13.	4	4	3	3	3	3	3	3
14.	4	4	4	4	4	4	4	4
15.	3	3	3	3	3	3	3	3

G. DATA SKPL LAYANAN KESEKRETARIATAN PIMPINAN FRAKSI/KELOMPOK DPD

RESPONDEN	NILAI RATA-RATA PER UNSUR PELAYANAN							
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8
1.	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	3	3	3	3	3	3	3	3
3.	4	3	4	3	4	4	4	4
4.	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	3	3	3	3	3	3	3	3
6.	3	2	3	3	3	3	3	3
7.	3	3	3	3	3	3	3	3
8.	4	4	4	1	4	4	4	4
9.	3	3	3	3	3	3	3	3
10.	4	3	3	3	3	3	3	3
11.	4	4	4	3	4	4	3	4
12.	3	4	3	3	3	3	3	3
13.	4	4	4	3	4	4	4	4
14.	3	3	3	3	3	3	3	3
15.	3	3	3	3	3	3	3	3
16.	3	3	3	3	3	3	3	3
17.	4	4	4	4	4	4	4	4
18.	3	3	3	3	3	3	3	3
19.	3	3	3	3	3	3	3	3
20.	4	4	4	4	4	4	4	4
21.	3	3	3	3	3	3	3	3
22.	3	3	4	3	4	4	4	4
23.	4	4	4	3	4	4	4	4
24.	3	3	3	3	3	3	3	3
25.	4	4	4	4	4	4	4	4
26.	3	3	3	3	3	3	3	3
27.	4	4	3	3	4	4	4	3
28.	3	3	3	3	3	3	3	3
29.	3	3	3	3	3	3	3	3
30.	3	3	3	3	3	3	3	3
31.	3	3	3	4	3	3	3	4
32.	4	4	4	2	4	4	4	4
33.	4	4	4	4	4	4	4	4
34.	3	3	3	3	3	3	3	3
35.	3	3	3	3	3	3	3	3
36.	4	4	4	4	4	4	4	4
37.	4	3	4	3	4	4	3	4
38.	3	3	3	3	3	3	3	3
39.	3	3	3	3	3	3	3	3
40.	3	3	3	3	3	3	3	3
41.	3	3	3	3	3	3	3	3
42.	4	4	4	4	4	4	4	4
43.	3	3	3	3	3	3	3	3
44.	3	3	3	2	3	4	3	3
45.	4	4	4	4	4	4	4	4
46.	3	3	3	3	3	3	3	3
47.	4	4	4	4	4	4	3	3
48.	3	3	3	3	3	3	3	3
49.	3	3	3	3	3	3	3	3
50.	4	4	4	3	4	4	4	3
51.	3	3	3	3	3	3	3	3
52.	3	3	3	3	4	4	4	4
53.	4	3	4	4	4	3	4	4
54.	3	3	3	3	4	4	3	3
55.	4	3	3	4	3	4	4	4
56.	3	3	3	3	3	3	3	3
57.	3	3	3	3	4	4	3	3
58.	3	4	4	3	4	4	4	4
59.	3	3	3	3	3	3	3	3
60.	3	3	3	3	3	3	3	3
dst.								
99	4	3	4	3	4	4	4	4

H. DATA SKPL LAYANAN SIDANG TAHUNAN

RESPONDEN	NILAI RATA-RATA PER UNSUR PELAYANAN							
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8
1.	1	1	1	1	1	1	1	2
2.	4	4	5	4	4	4	4	4
3.	5	5	5	4	5	5	5	5
4.	5	5	5	5	5	5	4	5
5.	3	4	4	4	4	4	4	4
6.	5	5	5	5	4	5	4	4
7.	5	5	5	5	5	5	5	5
8.	5	5	5	5	5	5	5	5
9.	5	5	5	4	5	5	4	4
10.	4	4	4	4	4	5	4	4
11.	5	5	5	5	5	5	5	5
12.	5	5	5	5	5	5	5	5
13.	4	4	4	4	4	3	4	3
14.	5	5	4	4	4	5	4	4
15.	5	5	5	5	5	5	4	5
16.	5	5	5	5	5	5	5	5
17.	5	5	5	5	5	5	5	5
18.	5	5	5	5	5	5	5	5
19.	5	5	5	5	5	5	5	5
20.	5	5	5	5	5	5	5	5
21.	5	5	5	5	5	5	5	5
22.	5	5	5	5	5	5	5	5
23.	5	5	5	5	5	5	5	5
24.	5	5	5	5	5	5	5	5
25.	5	5	5	5	5	5	5	5
26.	5	5	5	5	5	5	5	5
27.	5	4	5	5	5	5	4	4
28.	5	5	5	5	5	5	5	5
29.	5	5	5	5	5	4	4	5
30.	4	4	4	4	4	4	4	4
31.	5	5	4	5	5	5	5	5
32.	5	5	5	5	5	5	5	5
33.	5	5	5	5	5	5	4	4
34.	5	5	5	5	5	5	5	5
35.	5	5	5	5	5	5	5	5
36.	4	4	4	4	4	4	4	4
37.	5	5	4	5	5	5	5	4
38.	5	5	4	5	5	5	5	5
39.	4	4	5	4	3	2	2	2
40.	5	5	5	5	5	5	5	5
41.	5	5	5	5	5	5	5	5
42.	4	5	4	5	4	5	5	5
43.	5	5	5	5	5	5	5	5
44.	4	4	4	4	4	4	4	4
45.	5	5	5	5	5	5	5	5
46.	4	4	5	5	4	4	4	4
47.	5	5	5	4	5	5	4	4
48.	1	1	1	1	1	1	1	1
49.	5	5	4	4	4	4	5	5
50.	5	5	5	5	5	5	5	5
51.	5	5	5	5	5	5	5	5
52.	5	5	5	4	5	5	5	5
53.	5	5	5	5	5	5	5	5
54.	5	5	5	5	5	5	5	5
55.	4	4	4	4	4	4	4	4
56.	5	5	5	5	5	5	5	5
57.	4	4	4	4	4	4	4	4
58.	5	4	5	5	4	4	5	4
59.	5	5	5	5	5	5	5	5
60.	5	4	4	4	4	4	4	4
dst.								
430	5	5	5	4	4	4	4	4

LAMPIRAN 5

DATA IKSS 2: INDEKS REFORMASI BIROKRASI SETJEN MPR RI



KEMENTERIAN **panrb**

SISTEM INFORMASI LEMBAR KERJA **EVALUASI RB**

Hasil Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat

RB General	64.57
RB Tematik	2.54
Total Nilai	67.11
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	97
RB General Penyesuaian	66.57
Index RB	69.11
File Berkas	

LAMPIRAN 6

DATA IKSS 3: TINGKAT PEMENUHAN LAYANAN INTERNAL SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI

1. DATA LAYANAN INTERNAL BIRO SDM, ORGANISASI, DAN HUKUM

LAYANAN KESEHATAN

POLI UMUM	KELAS PASIEN	JUMLAH PASIEN
	ANGGOTA	176
	PENSIUNAN	82
	PEGAWAI	3268
	NON PEGAWAI	403
	KELUARGA ANGGOTA	1
	KELUARGA PEGAWAI	954
	KELUARGA PPNPN	95
	PPNPN	959
	KELUARGA NON PEGAWAI	85
	OSORSING	801
KELUARGA OSORSING	69	
TOTAL PASIEN	6893	

POLI GIGI	KELAS PASIEN	JUMLAH PASIEN
	ANGGOTA	15
	PENSIUNAN	4
	PEGAWAI	353
	NON PEGAWAI	50
	KELUARGA ANGGOTA	0
	KELUARGA PEGAWAI	101
	KELUARGA PPNPN	18
	PPNPN	59
	KELUARGA NON PEGAWAI	8
	OSORSING	40
KELUARGA OSORSING	2	
TOTAL PASIEN	650	

FISIOTERAPI	KELAS PASIEN	JUMLAH PASIEN
	ANGGOTA	57
	PENSIUNAN	22
	PEGAWAI	1131
	NON PEGAWAI	57
	KELUARGA ANGGOTA	1
	KELUARGA PEGAWAI	218
	KELUARGA PPNPN	3
	PPNPN	442
	KELUARGA NON PEGAWAI	0
	OSORSING	177
KELUARGA OSORSING	5	
TOTAL PASIEN	2113	

LABORATORIUM	KELAS PASIEN	JUMLAH PASIEN
	ANGGOTA	37
	PENSIUNAN	10
	PEGAWAI	326
	NON PEGAWAI	38
	KELUARGA ANGGOTA	2
	KELUARGA PEGAWAI	74
	KELUARGA PPNPN	7
	PPNPN	80
	KELUARGA NON PEGAWAI	1
	OSORSING	37
KELUARGA OSORSING	2	
TOTAL PASIEN	614	

LAYANAN PERSURATAN

No	Bulan	Permintaan	Pemenuhan	%
1	Januari	8	8	100
2	Februari	22	22	100
3	Maret	22	22	100
4	April	8	8	100
5	Mei	6	6	100
6	Juni	14	14	100
7	Juli	94	94	100
8	Agustus	313	313	100
9	September	381	381	100
10	Oktober	40	40	100
11	November	46	46	100
12	Desember	6	6	100

LAYANAN PENGELOLAAN EKSPEDISI

NO	KEGIATAN	Target	Permintaan
KEGIATAN PENGIRIMAN BAHAN			
1.	Sosialisasi Oleh Anggota MPR di Daerah Pemilihan Tahap I	711	704
2.	Sosialisasi Oleh Anggota MPR di Daerah Pemilihan Tahap II	711	711
3.	Sosialisasi Oleh Anggota MPR di Daerah Pemilihan Tahap III	711	214
4.	Sosialisasi Oleh Anggota MPR di Daerah Pemilihan Tahap IV	711	706
5.	Sosialisasi Oleh Anggota MPR di Daerah Pemilihan oleh Alat Kelengkapan	825	757
	Jumlah	3.669	3.092
KEGIATAN PENGIRIMAN DAN PENGEPAKAN BAHAN			
1.	Pemasyarakatan 4 Pilar Oleh Intansi/Ormas/Orpol	360	265
2.	Pemasyarakatan 4 Pilar Berbasis Komunitas	20	21
3.	Lokakarya Fraksi	12	3

NO	KEGIATAN	Target	Permintaan
4.	Temu Tokoh Nasional	10	14
5.	Seminar Fraksi	6	6
	Jumlah	408	309

LAYANAN PENJILIDAN DAN PENGGANDAAN

No	Bulan	Permintaan	Pemenuhan	%
1	Januari	11	11	100
2	Februari	12	12	100
3	Maret	4	4	100
4	April	5	5	100
5	Mei	15	15	100
6	Juni	22	22	100
7	Juli	15	15	100
8	Agustus	39	39	100
9	September	15	15	100
10	Oktober	10	10	100
11	November	15	15	100
12	Desember	15	15	100

LAYANAN HUKUM

NO.	BULAN	PENYUSUNAN PRODUK HUKUM	ADVOKASI HUKUM	TELAAHAN HUKUM	INFORMASI HUKUM
1.	JANUARI	109			
2.	FEBRUARI	11			
3.	MARET	11			
4.	APRIL	2			
5.	MEI	6			
6.	JUNI	6			
7.	JULI	4	4	9	2
8.	AGUSTUS	17			
9.	SEPTEMBER	17			
10.	OKTOBER	11			
11.	NOVEMBER	23			
12.	DESEMBER	9			
	Jumlah	226	4	9	2

LAYANAN RAPAT KERJA TERBATAS

No	Uraian
1	Rapat Kerja Pengelolaan BMN Setjen MPR RI Tanggal 23 Sampai Dengan 25 Februari 2023 Di Jakarta
2	Rapat Kerja Terbatas Pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023 Pada Tanggal 8 s.d 10 Pebruari 2023 Di Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta
3	Rapat Kerja Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI Pada Tanggal 24 s.d 26 Mei 2023 di Petamburan Jakarta Pusat
4	Rapat Kerja Evaluasi Kinerja Setjen MPR RI Tahun Anggaran 2023 tanggal 27 Mei 2023 Di Jakarta
5	Rapat Kerja Renaksi dan Akselerasi Penyerapan Anggaran dan Kinerja Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 1-3 September 2023 di Slipi, Jakarta Barat - DKI Jakarta
6	Rapat Kerja Terbatas Penyusunan Rencana Operasional dan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Tahun 2023 di Hotel Atria Gading Serpong tgl 1-3 Februari 2023
7	Kegiatan Rapat Kerja Penerapan Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI pada tanggal 8 s.d. 10 Maret 2023 di Kota Tangerang - Banten
8	Rapat Kerja Teknis Penyelenggaraan Maturitas SPIP terintegrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI pada tanggal 15 s.d 17 Maret 2023 di Kota Tangerang, Banten

LAYANAN RAPAT KERJA SEKRETARIAT JENDERAL

No	Uraian
1	Rapat Kerja Penyusunan Building Management di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI Tanggal 4 s.d. 6 November 2023 di Jakarta.
2	Rapat Kerja Penetapan Hasil (JPT) Pratama dan Hasil Rotasi dan Promosi Administrasi dan Pengawasan Lingkungan Tanggal 13 September 2023 Slipi, Jakarta Barat
3	Rapat Kerja Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI tahun Anggaran 2023 Pada Tanggal 8 sampai dengan 10 Desember 2023 di Jakarta Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Invoice Nomor.017.INV-PJCP.12.2023 tanggal 10 Desember 2023
4	Rapat Kerja Biro Perencanaan dan Keuangan dengan tema Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 pada tanggal 22 s.d 24 Desember 2023 (selama 3 hari, 2 malam) di Kota Pusat, Prov. DKI Jakarta

LAYANAN RAPAT KOORDINASI

No	Uraian
1	Pekerjaan Penyediaan Paket Fullboard Meeting Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Kinerja dan Persiapan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 pada tanggal 1-2 Juni 2023 di Jakarta
2	Realisasi SPPD Rapat Kerja Monitoring, Evaluasi serta Optimalisasi Anggaran & Kinerja Tahun 2023 Sekretariat Jenderal MPR RI di Hotel Santika, Slipi, Jakarta tgl 22-24 Oktober 2023
3	Rapat koordinasi persiapan Akreditasi klinik Pratama MPR RI Tahun anggaran 2023 pada tanggal 24 sampai dengan 26 November 2023 di Jakarta
4	Rapat Kerja Evaluasi Kinerja & Anggaran TA 2023 serta Rencana Aksi TA 2024 tgl 1 - 3 Desember 2023 di Hotel Aston Priority Simatupang Jakarta Selatan
5	Bimtek Penyusunan LAKIP Tahun 2023, Tanggal 25-27 November 2023 di Jakarta.

LAYANAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS

No	Uraian
1	Rapat koordinasi penyusunan rencana aksi program dan kegiatan TA 2023 di biro sdm, organisasi dan hukum pada tanggal 27 Januari 2023 .
2	Rapat koordinasi penyusunan rencana aksi program dan kegiatan TA 2023 di biro sdm, organisasi dan hukum pada tanggal 27 Januari 2023 .
3	Rapat koordinasi finalisasi bahan penyusunan rencana aksi program dan kegiatan TA 2023 pada tanggal 31 Januari 2023 .
4	Rapat koordinasi teknis pelaksanaan tugas di lingkungan setjen MPR RI pada tanggal 24 Mei 2023 .
5	Rapat koordinasi usulan anggaran tambahan biro SDM, organisasi dan hukum pada tanggal 12 Juni 2023 .
6	Rapat persiapan rakertas terkait mekanisme pertanggungjawaban keuangan TA 2023 pada tanggal 3 Maret 2023 .
7	Rapat Koordinasi Penyuluhan dan pemeriksaan Rohani Tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, Administrator, Pengawasan dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Setjen MPR tanggal 8 Des 2023
8	Rangka rapat koordinasi Pelaksanaan Medical Check-Up bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR R pada tanggal 11-13 Desember 2023 .
9	Rapat koordinasi Pelaksanaan MMPI bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR R pada tanggal 15 Desember 2023 .

2. DATA LAYANAN INTERNAL BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SISTEM INFORMASI

LAYANAN PEMELIHARAAN JARINGAN

NO.	BULAN	NAMA SUBJEK								
		KONEKSI INTERNET/LAN	INSTALASI BARU	APLIKASI ENUNJANG KINERJA	EMAIL	PRINTER	VIRUS/ANTIVIRUS	PENYINGKAT TAUTAN	TANDA TANGAN ELEKTRONIK	LAIN-LAIN
1	Januari	12	3	2	22	12	0	6	6	17
2	Februari	32	2	2	6	11	0	7	1	3
3	Maret	10	2	1	3	12	0	6	3	1
4	April	7	0	0	2	2	0	1	0	2
5	Mei	7	5	2	2	5	0	6	1	3
6	Juni	11	0	0	6	4	0	6	2	5
7	Juli	14	0	1	9	9	1	7	1	5
8	Agustus	12	0	0	4	8	0	10	2	3
9	September	9	0	2	2	11	0	3	1	3
10	Oktober	35	1	2	7	16	0	8	10	2
11	November	18	1	0	7	12	0	4	0	2
12	Desember	12	0	2	1	5	0	5	0	1
JUMLAH		179	14	14	71	107	1	69	27	47
JUMLAH KESELURUHAN						529				

LAYANAN PELIPUTAN DAN PUBLIKASI

NO	Peliput	Tanggal	Peliputan	Provinsi
1	Deri Irawan	5 - 8 Januari 2023	Peliputan kegiatan kunjungan kerja Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA (Bandung)	Jawa Barat
2	Deri Irawan	10 Januari 2023	Peliputan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, Narasumber kegiatan Konferensi Internasional Alumni Saudi Arabia, Pukul 11.0 WIB, di Hotel Sahid Jakarta	DKI Jakarta
3	Budiono	8 - 10 Januari 2023	Peliputan Wakil Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA, (Purwakarta)	Jawa Barat
dst.				
292	Deri Irawan	29 Desember-2 Januari	Peliputan kegiatan kunjungan kerja Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad ke Gorontalo	Sulawesi Utara

LAYANAN PENERIMAAN DELEGASI MASYARAKAT

NO	TANGGAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN	WAKTU	NAMA DELEGASI	TEMPAT	JUMLAH PESERTA
1	Monday, 09 January 2023	13.00	UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	GBHN lt. 3	50
2	Tuesday, 17 January 2023	09.00	SD Qurrota A'yun, Malang	GBHN lt. 3	90
3	Tuesday, 17 January 2023	13.00	Iik Strada, Jakarta	GBHN lt. 3	70
4	Thursday, 19 January 2023	09.00	SMP Negeri 1 Cipari, Cilacap	Nusantara V	265
5	Tuesday, 24 January 2023	09.00	SDN Mekarsari 02 Pagi, Jakarta	GBHN lt. 3	102
6	Wednesday, 01 February 2023	10.00	SDS Global Mandiri Cibubur	GBHN lt. 3	80
dst.					
71	Thursday, 14 Des 2023	09.00	Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA)	Nusantara V	250

LAYANAN MEDIA VISUAL DAN AUDIO VISUAL

No	Bulan	Jumlah Peliputan
1	Januari	119
2	Februari	119
3	Maret	101
4	April	46
5	Mei	130
6	Juni	125
7	Juli	137
8	Agustus	129
9	September	140
10	Oktober	108
11	November	104
12	Desember	53
TOTAL		1,311

LAYANAN PEMINJAMAN BAHAN PUSTAKA

No.	Tanggal Pinjam	Tanggal Dikembalikan	Nomor Induk	Judul Buku	Nomor Anggota	Nama Anggota	Jenis Kelamin	Nama Petugas Peminjaman	Nama Petugas Pengembalian
1	23 Desember 2022	2 Januari 2023	45010/B/12	Harta Karun Rackham Merah : Petualangan Tintin / HERGE	20052900004	Rahma Arifa, S.AP	Perempuan	Devira FA	Siti Junaenah
			45014/B/2012	Rahasia Unicorn : Petualangan Tintin / HERGE					
			42639/B/12	Asterix di Tengah Orang Swiss : Kisah Petualangan Asterix / Goscinny					
			42620/B/12	Asterix dan Orang-orang Gothi : Kisah Petualangan Asterix / Goscinny					
2	23 Desember 2022	02 Januari 2023	45041/B/2012	Naruto / Masashi Kishimoto	20061600001	Dedi Irawan, S.Fit	Laki-Laki	Devira FA	Siti Junaenah
			45042/B/2012	Naruto / Masashi Kishimoto					
			45043/B/2012	Naruto / Masashi Kishimoto					
			45044/B/2012	Naruto / Masashi Kishimoto					
dst.									
68	2 Maret 2023	16 Oktober 2023		Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	-	Eka Nurfitya	Perempuan	Siti Junaenah	Siti Junaenah
			2685/C/99	Gedung MPR /DPR RI					

LAYANAN PERPUSTAKAAN

NO	TAHUN 2023	BULAN											TOTAL	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
1	ANGGOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	PEGAWAI MPR	17	8	22	6	10	3	4	10	-	2	10	3	95
3	PEGAWAI DPR	-	-	1	-	15	1	15	12	5	2	2	-	53
4	PEGAWAI DPD	-	6	2	2	1	2	6	14	7	21	3	3	67
5	TENAGA AHLI	1	1	1	-	-	1	1	3	1	1	-	4	14
6	SD	-	80	168	-	-	-	-	-	150	-	75	-	473
7	SMP	-	966	275	-	-	-	-	212	300	-	75	-	1828
8	SMA	-	-	851	-	200	486	1	29	-	65	279	72	1983
9	MAHASISWA	2	-	19	3	-	103	35	12	2	20	56	30	282
10	GURU	-	-	63	-	14	-	-	-	-	51	-	-	128
11	UMUM	4	9	9	23	9	6	67	17	44	6	10	11	215
TOTAL PENGUNJUNG		24	1070	1411	34	249	602	129	309	509	168	510	123	5138

3. DATA LAYANAN INTERNAL BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

LAYANAN VERIFIKASI ANGGARAN DAN REALISASI PEMBAYARAN SATKER MAJELIS

NO	NO REGISTRASI	UNIT PENAGIH	URAIAN	NOMOR BKU	KODE KEGIATAN - MAK	TGL. BAYAR/KPPN	JURU BAYAR	STATUS DOKUMEN
1	R2023000014	Biro Sekretariat Pimpinan	Jamuan Konsumsi dalam rangka Wakil Ketua MPR RI Bpk. Arsulani menerima tamu dari Bapak Usman Perdana Kusuma beserta rombongan pada tanggal 4 Januari 2023	00031H/H01	CF.1008.AEA.001.053.A-521211	10-Feb-2023	Juru Bayar Majelis Rutin	Juru Bayar
2	R2023000015	Biro Sekretariat Pimpinan	Jamuan Konsumsi dalam rangka Wakil Ketua MPR RI Bpk. Arsulani menerima tamu dari UI/De pada tanggal 6 Januari 2023	00030H/H01	CF.1008.AEA.001.053.A-521211	10-Feb-2023	Juru Bayar Majelis Rutin	Juru Bayar
3	R2023000016	Biro Sekretariat Pimpinan	Jamuan Konsumsi dalam rangka Wakil Ketua MPR RI Bpk. Hidayat menerima tamu dari Pengurus PKS Amerika Eropa dan Belanda pada tanggal 11 Januari 2023	00037H/H01	CF.1008.AEA.001.053.A-521211	10-Feb-2023	Juru Bayar Majelis Rutin	Juru Bayar
4	R2023000017	Biro Sekretariat Pimpinan	Jamuan Konsumsi dalam rangka Wakil Ketua MPR RI Bpk. Hidayat menerima tamu dari DPC PKS Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada tanggal 9 Januari 2023	00048H/H01	CF.1008.AEA.001.053.A-521211	10-Feb-2023	Juru Bayar Majelis Rutin	Juru Bayar
5	R2023000018	Biro Sekretariat Pimpinan	Jamuan Konsumsi dalam rangka Wakil Ketua MPR RI Bpk. Fadeli menerima tamu dari Organisasi Pekerja Indonesia (OPGI) pada tanggal 9 Januari 2023	00040H/H01	CF.1008.AEA.001.053.A-521211	10-Feb-2023	Juru Bayar Majelis Rutin	Juru Bayar
6	R2023000019	Biro Sekretariat Pimpinan	Jamuan Konsumsi dalam rangka Wakil Ketua MPR RI Bapak Syarifudin menerima tamu dari PT. Taspen Cibinong pada tanggal 9 Januari 2023	00026H/H01	CF.1008.AEA.001.053.A-521211	10-Feb-2023	Juru Bayar Majelis Rutin	Juru Bayar
7	R2023000020	Biro Sekretariat Pimpinan	Jamuan Konsumsi dalam rangka Wakil Ketua MPR RI Bpk. Basarah menerima tamu dari FKPPi pada tanggal 4 Januari 2023	00013H/H01	CF.1008.AEA.001.053.A-521211	10-Feb-2023	Juru Bayar Majelis Rutin	Juru Bayar

dst.

NO	NO REGISTRASI	UNIT PENAGIH	URAIAN	NOMOR BKU	KODE KEGIATAN - MAK	TGL. BAYAR/KPPN	JURU BAYAR	STATUS DOKUMEN
4389	R2023014962	Biro Sekretariat Pimpinan	Realisasi pembelian konsumsi pada kegiatan rapat Deputi Bidang Administrasi pada tanggal 12 s.d. 20 Desember 2023.	06488/SIamet01	CF.1008.AEA.003.055.A-521211	27-Dec-2023	Juru Bayar Majelis Rutin	Juru Bayar
4390	R2023014971	Biro Sekretariat Pimpinan	Pembelian Konsumsi dalam rangka Ketua MPR RI, Bapak Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A. Menerima Tamu/Delegasi Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun pada tanggal 30 November	06165/SIamet01	CF.1008.AEA.001.053.A-521211	22-Dec-2023	Juru Bayar Majelis Rutin	Juru Bayar
4391	R2023014976	Biro Sekretariat Pimpinan	Hidayat menerima tamu dari DPC PKS Kota Bekasi pada tanggal 9 September 2023	06175/SIamet01	CF.1008.AEA.001.053.A-521211	22-Dec-2023	Juru Bayar Majelis Rutin	Juru Bayar
4392	R2023014977	Biro Sekretariat Pimpinan	Pembelian Konsumsi dalam rangka Wakil Ketua MPR RI Bpk. Hidayat menerima tamu dari DPD Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran (FKPO) pada tanggal 23 September 2023	06174/SIamet01	CF.1008.AEA.001.053.A-521211	22-Dec-2023	Juru Bayar Majelis Rutin	Juru Bayar
4393	R2023014978	Biro Sekretariat Pimpinan	Pembelian Konsumsi dalam rangka Wakil Ketua MPR RI Bpk. Hidayat menerima tamu dari DPC PKS Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2023	06173/SIamet01	CF.1008.AEA.001.053.A-521211	22-Dec-2023	Juru Bayar Majelis Rutin	Juru Bayar
4394	R2023014979	Biro Sekretariat Pimpinan	Pembelian Konsumsi dalam rangka Wakil Ketua MPR RI Bpk. Hidayat menerima tamu dari Tikh Masyarakat Duren Tiga Berselawat dan Pengurus DKM Masjid Jami An Nur, Duren Tiga	06171/SIamet01	CF.1008.AEA.001.053.A-521211	22-Dec-2023	Juru Bayar Majelis Rutin	Juru Bayar
4395	R2023014980	Biro Sekretariat Pimpinan	Pembelian Konsumsi dalam rangka Wakil Ketua MPR RI Bpk. Hidayat menerima tamu dan Yayasan Al Mustafa Bekasi Timur pada tanggal 5 September 2023	06169/SIamet01	CF.1008.AEA.001.053.A-521211	22-Dec-2023	Juru Bayar Majelis Rutin	Juru Bayar
4396	R2023010889	Biro Sekretariat Pimpinan	Pembelian Konsumsi dalam rangka Wakil Ketua MPR RI Bpk. Muzani menerima tamu dari Anggota DPRD RI Banten dan KADRI Cendriada pada tanggal 27 Oktober 2023	06209/SIamet01	CF.1008.AEA.001.053.A-521211	22-Dec-2023	Juru Bayar Majelis Rutin	Juru Bayar
4397	R2023013825	Biro Sekretariat Pimpinan	Pembelian Konsumsi dalam rangka Pimpinan MPR RI menerima Courtesy Call dari Presiden Republik Islam Iran pada tanggal 23 Mei 2023	06448/SIamet01	CF.1008.AEA.001.053.A-521211	27-Dec-2023	Juru Bayar Majelis Rutin	Juru Bayar
4398	R2023012649	Biro Sekretariat Pimpinan	Pembelian Konsumsi dalam rangka Penerimaan Tamu/Delegasi Ketua MPR RI, Bapak Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A. pada tanggal 6, 15 November 2023 di Jakarta.	06256/SIamet01	CF.1008.AEA.001.053.A-521211	27-Dec-2023	Juru Bayar Majelis Rutin	Juru Bayar

LAYANAN VERIFIKASI ANGGARAN DAN REALISASI PEMBAYARAN SATKER SETJEN

NO	NO REGISTRASI	UNIT PENAGIH	URAIAN	NOMOR BKU	KODE KEGIATAN - MAK	TGL. BAYAR/KPPN	JURU BAYAR	STATUS DOKUMEN
1	R2023000010	Biro Umum	Langganan Jasa dan Daya Listrik Bulan Januari 2023	WA.1014.EBA.994.002.E-522111		08-Feb-2023		Arsip
2	R2023000025	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Pekerjaan Pengadaan Barang Pakai Habis Laboratorium dan Fasilitas untuk Kebutuhan Layanan Kesehatan Sekretariat Jenderal MPR RI Bulan Januari 2023	00479/Jaya01	WA.1001.EBA.962.055.A-521811	13-Apr-2023	Juru Bayar Setjen Rutin	Juru Bayar
3	R2023000047	Biro Umum	Langganan Jasa dan Daya Telkom Bulan Januari 2023	00008/ES/01	WA.1014.EBA.994.002.E-522112	17-Feb-2023	Juru Bayar Setjen Rutin	Juru Bayar
4	R2023000048	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Pekerjaan pengadaan obat-obatan untuk kebutuhan layanan kesehatan Setjen MPR RI bulan Januari 2023	00037/Jaya01-TR	WA.1001.EBA.962.055.A-521811	06-Apr-2023	Juru Bayar Setjen Rutin	Juru Bayar
5	R2023000050	Biro Umum	Langganan Jasa dan Daya Telkom Bulan Januari 2023	00009/ES/01	WA.1014.EBA.994.002.E-522112	17-Feb-2023	Juru Bayar Setjen Rutin	Juru Bayar

dst.

NO	NO REGISTRASI	UNIT PENAGIH	URAIAN	NOMOR BKU	KODE KEGIATAN - MAK	TGL. BAYAR/KPPN	JURU BAYAR	STATUS DOKUMEN
3520	R2023014993	Biro Perencanaan dan Keuangan	***Pembelian Konsumsi dalam rangka Rapat Internal Harian tentang Pembahasan Tagihan Akhir Tahun Biro Perencanaan dan Keuangan Pembelian konsumsi Rapat koordinasi terkait pengembangan penambahan di aplikasi emarkit pada tanggal 25 September 2023	04224/tn/01	WA.1003.EBD.955.054.A-521211	27-Dec-2023	Juru Bayar Setjen Rutin	Juru Bayar
3521	R2023014996	Biro Perencanaan dan Keuangan	Pembelian konsumsi Rapat koordinasi terkait penambahan Tenaga Ahli Pimpinan pada tanggal 19 September 2023	04261/tn/01	WA.1003.EBD.955.055.A-521211	27-Dec-2023	Juru Bayar Setjen Rutin	Juru Bayar
3522	R2023014997	Biro Perencanaan dan Keuangan	Pembelian konsumsi pada Rapat koordinasi prediksi lembur pegawai MPR pada akhir tahun 2023 pada tanggal 29 September 2023	04262/tn/01	WA.1003.EBD.955.055.A-521211	27-Dec-2023	Juru Bayar Setjen Rutin	Juru Bayar
3523	R2023014998	Biro Perencanaan dan Keuangan	Pembelian konsumsi Rapat konsultasi terkait Gaji dan lembur Pegawai, PPHN, Tenaga Ahli dan Staf Ahli Pimpinan MPR pada tanggal 12 Desember 2023	04263/tn/01	WA.1003.EBD.955.055.A-521211	27-Dec-2023	Juru Bayar Setjen Rutin	Juru Bayar
3524	R2023014999	Biro Perencanaan dan Keuangan	Honorarium Narasumber pada tanggal 27 Desember 2023	04228/Dhina/01	WA.1002.EBA.963.056.A-522151	27-Dec-2023	Juru Bayar Setjen Rutin	Juru Bayar

LAYANAN VERIFIKASI DOKUMEN, SERTA PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN

NO	NO REGISTRASI	UNIT PENAGIH	URAIAN	NOMOR BKI	KODE KEGIATAN - MAK	TGL. BAYAR/KPP	CARA BAYAR	STATUS DOKUME
1	R2023000211	Biro Perencanaan dan Keuangan	Gaji Induk Pegawai bulan Januari tahun 2023 untuk 343 Pegawai/893 jiwa		WA.1003.EBA.994.001.A-511111	01-Jan-2023	LS	Pembuat SPM
2	R2023000213	Biro Perencanaan dan Keuangan	Gaji Pimpinan MPR RI untuk bulan Januari Tahun 2023 untuk 10 orang/38 jiwa		WA.1003.EBA.994.001.A-511311	01-Jan-2023	LS	Pembuat SPM
3	R2023000212	Biro Perencanaan dan Keuangan	Gaji Induk Pegawai bulan Februari Tahun 2023 untuk 343 pegawai/895 jiwa		WA.1003.EBA.994.001.A-511111	11-Jan-2023	LS	Pembuat SPM
4	R2023000214	Biro Perencanaan dan Keuangan	Gaji Pimpinan MPR RI untuk bulan Februari tahun 2023 untuk 10 orang/38 jiwa		WA.1003.EBA.994.001.A-511311	16-Jan-2023	LS	Pembuat SPM
5	R2023001868	Biro Perencanaan dan Keuangan	Uang makan pegawai untuk bulan februan tahun 2023 untuk 340 pegawai		WA.1003.EBA.994.001.A-511129	10-Mar-2023	LS	Pembuat SPM
dst.								
222	R2023013917	Biro Perencanaan dan Keuangan	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Kinerja bulan Agustus tahun 2023 atas nama Siti Fauziah untuk 3 Pegawai		WA.1003.EBA.994.001.A-512411		LS	Pembuat SPM
223	R2023013919	Biro Perencanaan dan Keuangan	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Kinerja bulan September tahun 2023 atas nama Siti Fauziah untuk 3 Pegawai		WA.1003.EBA.994.001.A-512411		LS	Pembuat SPM
224	R2023013984	Biro Perencanaan dan Keuangan	Pembayaran Belanja Pegawai - Uang Lembur PPPK Setjen MPR RI bulan November 2023 sesuai SPKL/No.377/B-IV/PN/11/2023 tanggal 1 November 2023 a.n Rizki Taufik Kurniawan		WA.1003.EBA.994.001.A-512212		LS	Pembuat SPM
225	R2023014834	Biro Perencanaan dan Keuangan	Pembayaran Uang Makan PNS Sekretariat Jenderal MPR untuk bulan Desember tahun 2023	00136/tnt/01-TR	WA.1003.EBA.994.001.A-511129	20-Dec-2023	TUP	Pembuat SPM
226	R2023014835	Biro Perencanaan dan Keuangan	Pembayaran uang makan PPK Sekretariat Jenderal MPR RI bulan Desember tahun 2023 untuk 5 pegawai	00135/tnt/01-TR	WA.1003.EBA.994.001.A-511628	20-Dec-2023	TUP	Pembuat SPM

LAYANAN VERIFIKASI DAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

NO	NO REGISTRASI	UNIT PENAGIH	URAIAN	NOMOR BKI	KODE KEGIATAN - MAK	TGL. BAYAR/KPP
1	R2023000140	Biro Sekretariat Pimpinan	Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Wakil Ketua MPR RI Bapak H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., LL.D. ke Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 14-15 Januari 2023 (2 hari)	00342/HH/01	CF.1008.AEA.002.053.A-524111	15-Mar-2023
2	R2023000153	Biro Sekretariat Pimpinan	Realisasi Biaya Perjalanan Dinas Ketua MPR RI Bapak H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A. ke Kota Bandung Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13-14 Januari 2023	00272/HH/01	CF.1008.AEA.002.053.A-524111	09-Mar-2023
3	R2023000356	Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi	Realisasi Kegiatan Perisalahan pada Rapat Pimpinan Badan Sosialisasi tanggal 24 s.d. 26 Januari 2023 di Hotel Aryaduta Tangerang	00158/DW/01	CF.6487.BLA.001.054.A-524111	28-Feb-2023
4	R2023000393	Biro Pengkajian Konstitusi	Pemohonan pembayaran uang ganti tiket a.n Rambe Kamarul Zaman Jakarta-Pekanbaru	00265/DW/01	CF.5003.ABC.003.051.A-524119	09-Mar-2023
5	R2023000428	Biro Pengkajian Konstitusi	Realisasi Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Rapat Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI tanggal 16 s.d 18 Januari 2023 di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	00137/DW/01	CF.5003.ABC.001.051.A-524119	28-Feb-2023
dst.						
3531	R2023014762	Inspektorat	Perjalanan Dinas Dalam Kota pada kegiatan Evaluasi Hasil Rekomendasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan MPR RI Tahun Anggaran 2022 di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2023	04216/tnt/01	WA.6485.EBD.965.052.A-524113	27-Dec-2023
3532	R2023014789	Biro Perencanaan dan Keuangan	Transport dalam kota ke KPPN Jakarta VII pada tanggal 4 September 2023	04273/tnt/01	WA.1003.EBD.955.055.A-524113	28-Dec-2023
3533	R2023014794	Biro Perencanaan dan Keuangan	Transport dalam kota ke KPPN Jakarta VII pada tanggal 21 Agustus 2023	04250/tnt/01	WA.1003.EBD.955.055.A-524113	27-Dec-2023
3534	R2023014836	Biro Perencanaan dan Keuangan	Transport dalam kota ke KPPN Jakarta VII pada tanggal 25 Agustus 2023	04249/tnt/01	WA.1003.EBD.955.055.A-524113	27-Dec-2023
3535	R2023013412	Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi	Perjalanan Dinas Pelaksanaan Peluputan Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Oleh Ketua MPR RI	04242/Dhina/01	WA.1002.EBA.958.052.A-524111	27-Dec-2023
3536	R2023014982	Biro Perencanaan dan Keuangan	***Transport dalkot untuk Konsolidasi dan Koordinasi ke DJPb tanggal 21 Desember 2023	04271/tnt/01	WA.1003.EBD.955.055.A-524113	28-Dec-2023
3537	R2023014983	Biro Perencanaan dan Keuangan	Transport dalam kota ke LKPP pada tanggal 14 Desember 2023	04270/tnt/01	WA.1003.EBD.955.055.A-524113	28-Dec-2023
3538	R2023014984	Biro Perencanaan dan Keuangan	***Transport dalam kota ke DJPb Kemenkeu pada tanggal 15 Desember 2023.	04272/tnt/01	WA.1003.EBD.955.055.A-524113	28-Dec-2023

4. DATA LAYANAN INTERNAL BIRO UMUM

LAYANAN PENGELOLAAN BMN

NO.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan	Jumlah Layanan Terpenuhi
1	Permintaan ATK	152	139
2	Permintaan/pendistribusian BMN	771	771
3	Permintaan seminar kit / tas	225	225
	Jumlah	1148	1135

LAYANAN AKOMODASI

NO.	JENIS PERMINTAAN	JUMLAH PERMINTAAN MASUK	JUMLAH PERMINTAAN YANG DIPENUHI
1	Permintaan ruang rapat	325	322
2	Permintaan Petugas Akomodasi	91	84
3	Permintaan Perlengkapan Akomodasi	85	85
4	Permintaan Buka/Tutup Pintu	129	129
5	Permintaan Perlengkapan Upacara	13	13
6	Penataan Ruang Kerja	2	2
	Jumlah	645	635

LAYANAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN TAMAN

No	Jenis Permintaan (Nodin)	Permintaan Masuk (Per Bulan)												Jumlah Permintaan Masuk	Jumlah Permintaan Yand Dipenuhi
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
1	Perbaikan Komputer	11	13	16	3	9	11	13	7	2	10	13	1	109	98
2	Permohonan Dry Garden	14	20	18	6	26	8	19	14	7	7	13	7	159	159
3	Pemeliharaan Gedung Kantor	8	12	12	4	7	9	7	4		9	5	1	78	78
4	Pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan	9	2	11	5	13	12	5	7	4	6	3		77	77
Total														423	412
Persentase (%)															97,40%

NO	NAMA PEMELIHARAAN	TANGGAL PEMELIHARAAN	LOKASI	KETERANGAN
1	Rental Pewangi Ruangan	1 Jan - 31 Desember 2023	Nusantara 3, 4, 5 dan Bharana Graha	Pemeliharaan Rutin
2	Sanitary Bin	1 Jan - 31 Desember 2023	Nusantara 3, 4, 5 dan Bharana Graha	Pemeliharaan Rutin
3	Taman Indoor dan Outdoor	1 Jan - 31 Desember 2023	Nusantara 3, 4, 5 dan Bharana Graha	Pemeliharaan Rutin
4	Pemasangan hand dryer	1 Jan - 31 Desember 2023	Nusantara 3	Pemeliharaan Rutin
5	Kursi Pimpinan	13 April 2023	Nusantara 3	Rusak
6	Sofa	13 April 2023	Nusantara 3	Rusak
7	AC Split	10 Mei 2023	Nusantara 3, IV, Bharana Graha	Bocor
8	Repeater	30 Maret 2023	Nusantara 3, 4, 5 dan Bharana Graha	Pemeliharaan Rutin
9	Plumbing	1 Jan - 31 Desember 2023	Nusantara 3, 4, 5 dan Bharana Graha	Pemeliharaan Rutin
10	Hydrant	1 Jan - 31 Desember 2023	Nusantara 3, 4, 5 dan Bharana Graha	Pemeliharaan Rutin
11	Instalasi Sprinkler	11 Oktober 2023	Nusantara 3, 4, 5 dan Bharana Graha	Kerusakan
12	Fire Alarm	1 Maret 2023	Nusantara V	Perawatan Head Detector
13	Instalasi Lampu Penerangan	1 Jan - 31 Desember 2023	Nusantara 3, 4, 5 dan Bharana Graha	Penggantian Lampu (Insidental)
14	Panel Listrik	21 Februari 2023	Nusantara III	Perbaikan Panel Starter Pompa Chiller System
15	Panel Listrik	19 Mei 2023	Nusantara	Perawatan Panel Input dan Output UPS 2
16	AC Central	1 Jan - 31 Desember 2023	Nusantara 3, 4, 5 dan Bharana Graha	Pemeliharaan Rutin
17	Sound System	1 Maret 2023	Nusantara V	Perawatan Ceiling Speaker
18	Cooling Tower	1 Jan - 31 Desember 2023	Nusantara 3, 4, 5 dan Bharana Graha	Pemeliharaan Rutin
19	Genset	1 Jan - 31 Desember 2023	Nusantara 3, 4, 5 dan Bharana Graha	Pemeliharaan Rutin
20	Audio Visual	4 Juli 2023	Pintu masuk	Perawatan Videotron
21	Sistem Telekomunikasi PABX	1 Jan - 31 Desember 2023	Nusantara 3, 4, 5 dan Bharana Graha	Pemeliharaan Rutin
22	Eskalator dan Lift	1 Jan - 31 Desember 2023	Nusantara 4, 5 dan Bharana Graha	Pemeliharaan Rutin
23	Instalasi MATV	1 Jan - 31 Desember 2023	Nusantara 3 dan 4	Pemeliharaan Rutin
24	Battery UPS	18 Agustus 2023	UPS Gedung Bulat	Perawatan Battery UPS 12100
25	Tabung Pemadam Kebakaran	8 Februari 2023	Nusantara 3, 4, 5 dan Bharana Graha	Refill
26	Tabung Pemadam Kebakaran	7 Desember 2023	Nusantara 3, 4, 5 dan Bharana Graha	Refill
27	Fumigasi	6 Maret 2023	Ruang Arsip	Rutin
dst.				
45	Spring Bed	27 Oktober 2023	Rumah Dinas Deputi Pengkajian	Kotor

LAYANAN INSTALASI MEKANIKAL ELEKTRIKAL

NO	Jenis Permintaan (Nodin)	Permintaan Masuk (Per Bulan)												Jumlah Permintaan Masuk	Jumlah Permintaan yang Dipenuhi
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
1	Permohonan Fasilitas Instalasi Ruang Rapat	20	23	30	13	40	18	25	26	16	5	16	10	242	242
2	Permohonan Perbaikan Instalasi	5	8	6	2	9	2	1	1	2	8	7	0	51	51
3	Permohonan Personil Instalasi	2	3	8	3	5	5	11	0	1	12	12	3	65	65
TOTAL													358	358	
PERSENTASE (%)														100%	

===



MPR 
Rumah Kebangsaan



mprgoid

Website : www.mpr.go.id